

2025-2029

RENSTRA

RENCANA STRATEGI



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I PENDAHULUAN
Memuat :
 1. Latar Belakang;
 2. Dasar Hukum Penyusunan;
 3. Maksud dan Tujuan;
 4. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolompok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
 - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b) Isu strategis.
 - c. Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat :
 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
 2. Uraian Kegiatan;
 3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
 6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl R.A Kartini No. 18 Palu Telp/Fax. (0451) 454030

UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 424523

UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 4011790

Rumah Coklat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. Kartini No. 41 Palu

UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 800.1.4.3/687/Sekretariat

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025-2029

- Menimbang :
- Bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kesatu : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas ;

- a. Menyajikan data target dan Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
- c. Menyajikan data time series selama 4 tahun terakhir atas aspek-aspek dan urusan yang ditangani OPD;
- d. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;

- e. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
- f. Melakukan Pembahasan Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- g. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
- h. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
- i. Melaksanakan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan Penentuan Sasaran dan Kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
- k. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Palu
Pada tanggal : 31 Juli 2025

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 800.1.4.3 / 687 / Sekretariat

Tanggal : 31 Juli 2025

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

- 1 Ketua Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- 2 Sekretaris Sekretaris Dinas
- 3 Anggota Kepala Bid. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
Kepala Bid. Perdagangan Luar Negeri
Kepala Bid. Pembangunan Sumber Daya Industri
Kepala Bid. Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri
Kasubbag Perencanaan Program
Kasubbag Keuangan dan Asset
Kasubbag Kepegawaian dan Umum
Kepala UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
Kepala UPTD Pengembangan Produk Industri pangan dan Kerajinan Daerah
Kepala UPT Pelaksanaan Teknis Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
Kepala Seksi Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang
Kepala Seksi Kalibrasi
Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengembangan Produk Industri pangan dan Kerajinan Daerah
Kepala Seksi Industri Kemasan Dan Kerajinan Daerah
Kepala Seksi Pengembangan Produk Pangan
Kasubbag Tata Usaha UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
Kepala Seksi Pengawasan Barang dan Jasa, Tertib Niaga dan Penegakkan Hukum
Kepala Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen
Pejabat Fungsional Bidang
Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bagian Perencanaan Program
Analisis Perencanaan Ahli Pertama Sub Bagian Perencanaan Program

KERALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



RICHARD ARNALDO, SE. MSA

Pembina Utama Madya

NIP. 19821123 200604 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-PD), serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Visi pembangunan 5 tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah ***“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”***. Visi Pembangunan ini akan terimplementasikan dengan baik apabila didukung dengan perencanaan yang komprehensif yang didasarkan atas data yang valid serta mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan Renstra, arah dan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih mudah dievaluasi. Dan diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi

Tengah dapat menjadi institusi yang akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mampu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan materi dokumen ini. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen Renstra 2025-2029 ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga upaya mulia kita dalam menata pembangunan Sulawesi Tengah-ke depan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdaya guna dan memberikan maslahat bagi rakyat Sulawesi Tengah.

Sekian dan terimakasih.

Palu, 10 Oktober 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE. MSA

Pembina Utama Madya

NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	KP-i
DAFTAR ISI	DI-i
DAFTAR TABEL	DT-i
DAFTAR GAMBAR	DG-i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
a. Latar Belakang.....	I-1
b. Fungsi Renstra.....	I-4
c. Proses Penyusunan Renstra.....	I-5
d. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD.....	I-8
e. Keterkaitan Renstra K/L dan Renstra Provinsi dengan Renja PD.....	I-11
1.2 Landasan Hukum.....	I-15
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-20
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-21
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH..	II-23
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-23
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	II-23
b. Sumber Daya PD	II-36
c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD	II-44
d. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	II-51
e. Kerjasama Perangkat Daerah	II-52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-54
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-54
b. Isu Strategis PD.....	II-57
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	III-61
3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.....	III-61
3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD	III-63
3.3 Tujuan RENSTRA PD	III-65
3.4 Sasaran RENSTRA PD.....	III-66
3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029	III-68

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... IV-74****BAB V PENUTUP V-248**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Juni Tahun 2025	II – 36
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan per Juni Tahun 2025	II – 37
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Golongan per Juni Tahun 2025	II – 37
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Esselon per Juni Tahun 2025	II – 38
Tabel 2.5	Keadaan Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II – 39
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II – 45
Tabel 2.7	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat Daerah	II – 50
Tabel 2.8	Uraian Masalah dan Faktor Penghambat	II – 55
Tabel 2.9	Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	II – 58
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.....	III – 67
Tabel 3.2	Pentahapan RENSRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.....	III – 69
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra PD.....	III – 72
Tabel 4.1	Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 79
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 82
Tabel 4.3.1	Indikator Kinerja Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 208
Tabel 4.3.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 209
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 245
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 247
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	IV – 247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perindag.....	I – 7
Gambar 1.2	Keterkaitan dokumen RPJMD dengan Renstra PD.....	I – 11
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.....	II – 25
Gambar 3.1	Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 2.....	III – 64
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.....	III – 65
Gambar 3.3	Logframe Sasaran RPJMD dan Tujuan RENSTRA PD.....	III – 66
Gambar 3.4	Cascading Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD.....	III – 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

a. Pengertian Renstra

Perencanaan pembangunan pada prinsipnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan salah satu cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mensejahterakan rakyat melalui aktivitas pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut dibutuhkan dukungan sumber daya pembangunan berupa sumberdaya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya buatan.

Perencanaan merupakan satu tahap dari proses manajemen yang sangat mempengaruhi tahapan dalam proses manajemen lainnya. Dengan perencanaan yang terpadu akan menghasilkan pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian yang terpadu. Mengingat pentingnya perencanaan terpadu ini maka pemerintah dengan persetujuan DPR telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional diharapkan akan mengintegrasikan dan mensinkronkan sistem perencanaan yang ada, sehingga menghasilkan suatu sistem perencanaan yang komprehensif dan holistik. Selain itu, sistem perencanaan ini juga akan menghasilkan perencanaan yang akuntabel, transparan dan terpadu dengan sistem penganggaran.

Pembangunan di daerah Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2021- 2024 pada satu sisi telah memberikan hasil yang positif dalam berbagai bidang pembangunan. Namun berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, pada sisi lainnya harus diakui, masih terdapat berbagai masalah penting dan mendasar yang harus segera diatasi, dan berbagai permasalahan lainnya yang

berkembang seiring dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan tersebut.

Berbagai permasalahan mendasar tersebut antara lain; relatif tingginya persentase dan besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terdapat kecenderungan memburuknya distribusi pendapatan, masih rendahnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan hak-hak dasar manusia yang belum sepenuhnya dapat terpenuhi secara merata dan adil, kondisi infrastruktur yang belum memadai, kondisi produk barang dan jasa yang tingkat produktivitasnya masih rendah. Kondisi tersebut salah satunya dapat diatasi melalui perkembangan dan peningkatan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara substansi pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan : a) holistik tematik; b) integratif; dan c) spasial dan pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian di ayat (2) dijelaskan bahwa pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9

huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dalam upaya mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 111 menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- 1) pendahuluan;
- 2) gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- 4) tujuan dan sasaran;
- 5) strategi dan arah kebijakan;
- 6) rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- 7) kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- 8) penutup.

Dinamika perkembangan Peraturan dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

061/2911/SJ tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Terbitnya Perda No 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi yang ditindaklanjuti dengan : Pergub No 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas, unit pelaksana teknis badan dan cabang dinas yaitu terbentuknya UPT P2IPK dan UPT PSMB. Pergub No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas yaitu terbentuknya UPT P2K.

Berdasarkan hal tersebut Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, sehingga Renstra PD Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan solusi strategi dan kebijakan dalam peningkatan daya saing daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Fungsi Renstra

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomidaerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan hal di atas dan sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bahwa renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra-PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan ruang keleluasaan kepada pemerintah daerah khususnya PD untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam penentuan proses perencanaan yang lebih bernilai strategis dan hasilnya tidak saja diukur secara parsial melainkan harus diukur secara komprehensif. Disisilain desentralisasi dan otonomi daerah lebih menuntut kemandirian pemerintah daerah dan perlu didukung oleh kapabilitas dan kapasitas dari PD.

Fungsi dibuatnya Renstra PD adalah untuk menjabarkan RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 – 2029. Selanjutnya Renstra PD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja PD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

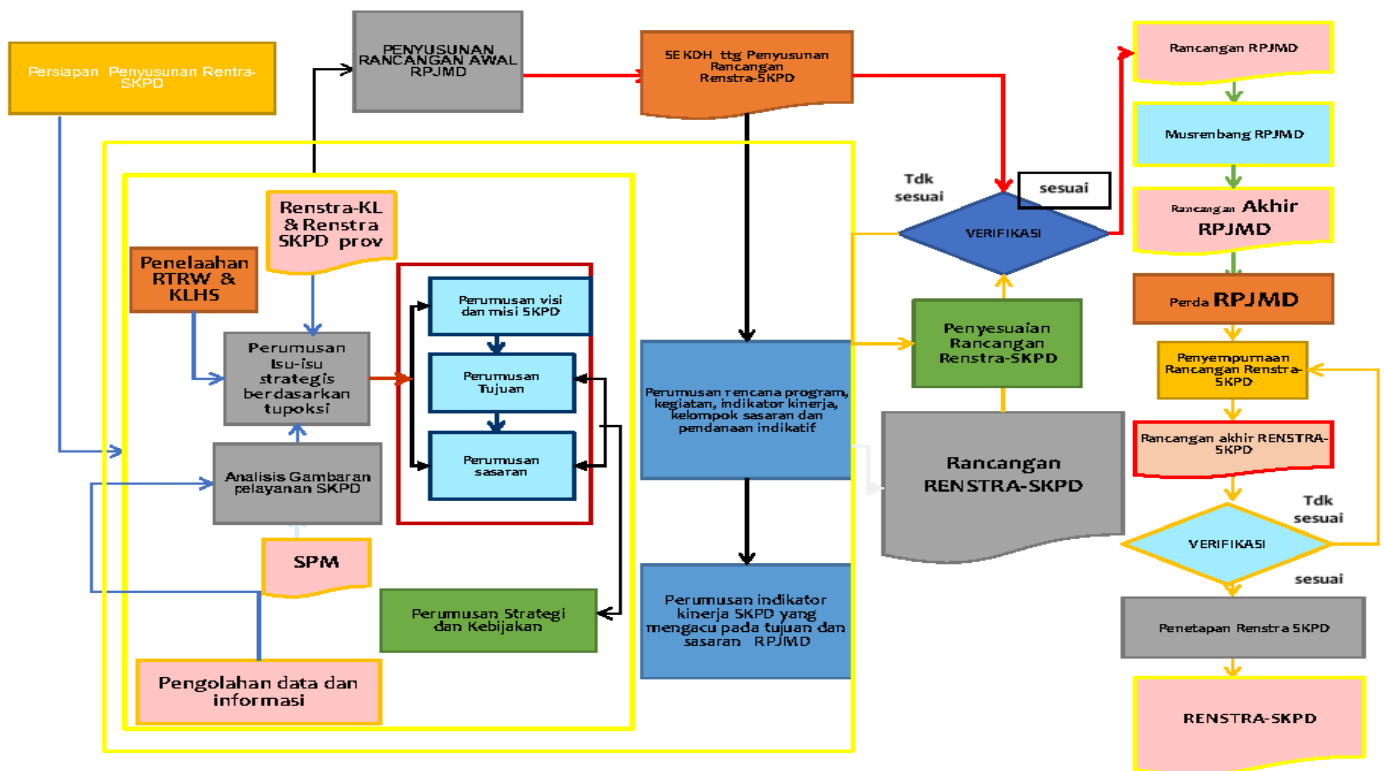
c. Proses Penyusunan Renstra

Telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi teknis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Proses penyusunan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029 dan mekanisme mengacu pada garis kebijakan yang tertuang dalam (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur.

Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku 5 (lima) tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah 2025-2029, merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Oleh karena itu, penyesuaian dan konsolidasi data dan informasi strategis yang dimuat didalam renstra ini sejalan dengan dokumen RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2025-2029.

Adapun tahapan/mechanisme penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1 yang tersaji sebagai berikut:



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perindag

Renstra PD sebagaimana yang ditekankan oleh Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Permendagri No. 54 Tahun 2010 mensyaratkan adanya indikator kinerja yang terukur sebagai basis penyusunan Rencana Program/Kegiatan dan pagu pendanaan indikatif. Dengan demikian, program, kegiatan dan anggaran setiap tahun selama 5 (lima) tahun berdasarkan indikator-indikator yang tentu saja mengacu kepada sasaran-sasaran strategis pembangunan. Sasaran-sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari tujuan atau grand strategy pembangunan serta turunan dari Visi dan Misi daerah. Asistensi Renstra PD merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara grand strategy/tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Kemudian menterjemahkan indikator-indikator kinerja ke

dalam target- target pembangunan yang harus dicapai melalui program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas. Tahapan penyusunan Renstra PD dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, pelaksanaan forum PD/Lintas PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD dan Penetapan Renstra PD.

d. Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025-2029 akan menjabarkan secara komprehensif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, di mana telah ditetapkannya prioritas daerah sebagai acuan didalam menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan RPJMD.

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan urusan Perindustrian dan urusan perdagangan. RPJMD menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah, termasuk pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan. RPJMD 2025-2029 mengangkat visi "Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan", dengan 4 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan lapangan kerja;
2. Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan berorientasi pada konektivitas antar wilayah dan antar sektor;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif serta Keamanan Daerah yang Tangguh Berlandaskan Nilai Religius dan Kearifan Lokal.

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah menempatkan industri sebagai salah satu fokus utama yang secara langsung menuntut adanya program dan kegiatan yang mendukung pengembangan sektor industri di Sulawesi Tengah. Sedangkan terkait misi secara spesifik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah melaksanakan misi 2 (dua) dalam RPJMD, yaitu mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Dalam pencapaian visi misi RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah 2025, Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah merumuskan 9 (sembilan) program prioritas atau lebih dikenal dengan “Sembilan Berani” yaitu (1) Berani Cerdas, (2) Berani Sehat, (3) Berani Sejahtera, (4) Berani Hsarmoni, (5) Berani Makmur, (6) Berani Lancar, (7) Berani Menyala, (8) Berani Berkah dan, (9) Berani Berintegritas. Dari 9 (sembilan) berani diatas, yang menjadi program prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Berani Sejahtera dan Berani Makmur dengan program prioritas sebagai berikut :

- 1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (berani sejahtera);
- 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (berani makmur);
- 3) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (berani makmur);
- 4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri (berani makmur)

5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (berani makmur).

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi PD untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur tersebut. Dokumen rencana tersebut adalah Rencana Strategis Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Tengah yang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029. Keterkaitan antar dokumen RPJMD dan renstra PD dalam system perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada gambar yang tersaji pada gambar 1.2 berikut:

kualitas sumber daya manusia, dan penurunan tingkat kemiskinan. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan sektor industri sebagai pilar utama dan peningkatan investasi di kawasan industri. Selain itu, fokus diberikan pada pengembangan industri prioritas, aglomerasi industri, akselerasi ekspor, penguatan industri kecil dan menengah (IKM), serta penerapan industri hijau.

Sasaran Strategis Pembangunan Industri 2025-2029:

1. **Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Berkelanjutan**
Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan sektor industri sebagai penggerak utama.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Fokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian tenaga kerja industri.
3. **Pengembangan Industri Prioritas**
Fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan memberikan nilai tambah.
4. **Aglomerasi Industri**
Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus untuk efisiensi dan daya saing.
5. **Akselerasi Ekspor**
Meningkatkan daya saing produk industri di pasar global.
6. **Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
Menjadikan IKM sebagai mitra strategis dalam rantai pasok industri.
7. **Penerapan Industri Hijau**
Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
8. **Transformasi Digital Industri**
Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh proses produksi dan bisnis industri.
9. **Peningkatan Investasi**

Target investasi sebesar Rp 13.032 triliun selama periode 2025-2029.

Strategi yang Mendukung Sasaran

1. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi : Melalui penerapan teknologi modern dan inovasi.
2. Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa : Memenuhi standar kualitas global dan kebutuhan pasar.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia : Melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi tenaga kerja.
4. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung : Seperti transportasi, energi, dan komunikasi.
5. Penguatan Kelembagaan : Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan regulasi yang mendukung.

Dengan mencapai sasaran strategis ini, diharapkan pembangunan industri dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Urusan Perdagangan

Sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka arah kebijakandan strategi pembangunan sektor perdagangan 2025-2029 difokuskan pada , fokus pada peningkatan kinerja ekspor, pengembangan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perdagangan. Sasaran-sasaran ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang bertujuan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.

Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan 2025-2029 :

1. Peningkatan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa:

Fokus pada perluasan pasar ekspor, yang akan diukur melalui indikator seperti kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB dan peningkatan perdagangan antar wilayah. Targetnya adalah meningkatkan pangsa pasar ekspor Indonesia di dunia dan meningkatkan nilai perdagangan antar wilayah.

2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri:

Meliputi revitalisasi pasar tradisional, pemantauan ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan stabilitas harga.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Fokus pada pengembangan kompetensi SDM di sektor perdagangan, termasuk penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

4. Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi:

Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 5,8% pada tahun 2029.

5. Prioritas Nasional yang Mendukung:

Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sektor perdagangan.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja di sektor perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

7. Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan:

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan melalui pengembangan sektor perdagangan.

Sasaran Strategis yang Ingin Dicapai:

- 1) Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa, yang diukur melalui indikator seperti Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB dan peningkatan perdagangan antar wilayah.
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1 hingga 5,2 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,8 persen pada 2029.

Renstra Kementerian Perdagangan 2025-2029 akan menjadi fondasi penting dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pada peningkatan kinerja ekspor, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Kemendag berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan **Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029** adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 21. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor Nomor 51);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Tahun 2018-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 107, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 161).
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan Dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 487);
30. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor : 523);
31. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.
32. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2025-2029 yang mampu beradaptasi dengan segala perubahan lingkungan strategis baik ditingkat provinsi, regional maupun nasional. Dengan maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah 2025 – 2029, sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan professional berdasarkan indikator kinerja;
2. Memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran;
4. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memahami dan melaksanakan arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam waktu 5 (lima) tahun;
5. Menjadi landasan tolak ukur dalam evaluasi kinerja tahunan dan sebagai referensi wajib dalam penyusunan LAKIP setiap tahun pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
 - f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah
 - g. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029;
- 3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029;
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program Perangkat Daerah

4.2 Uraian Kegiatan Perangkat Daerah

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

1) Tugas dan Fungsi PD

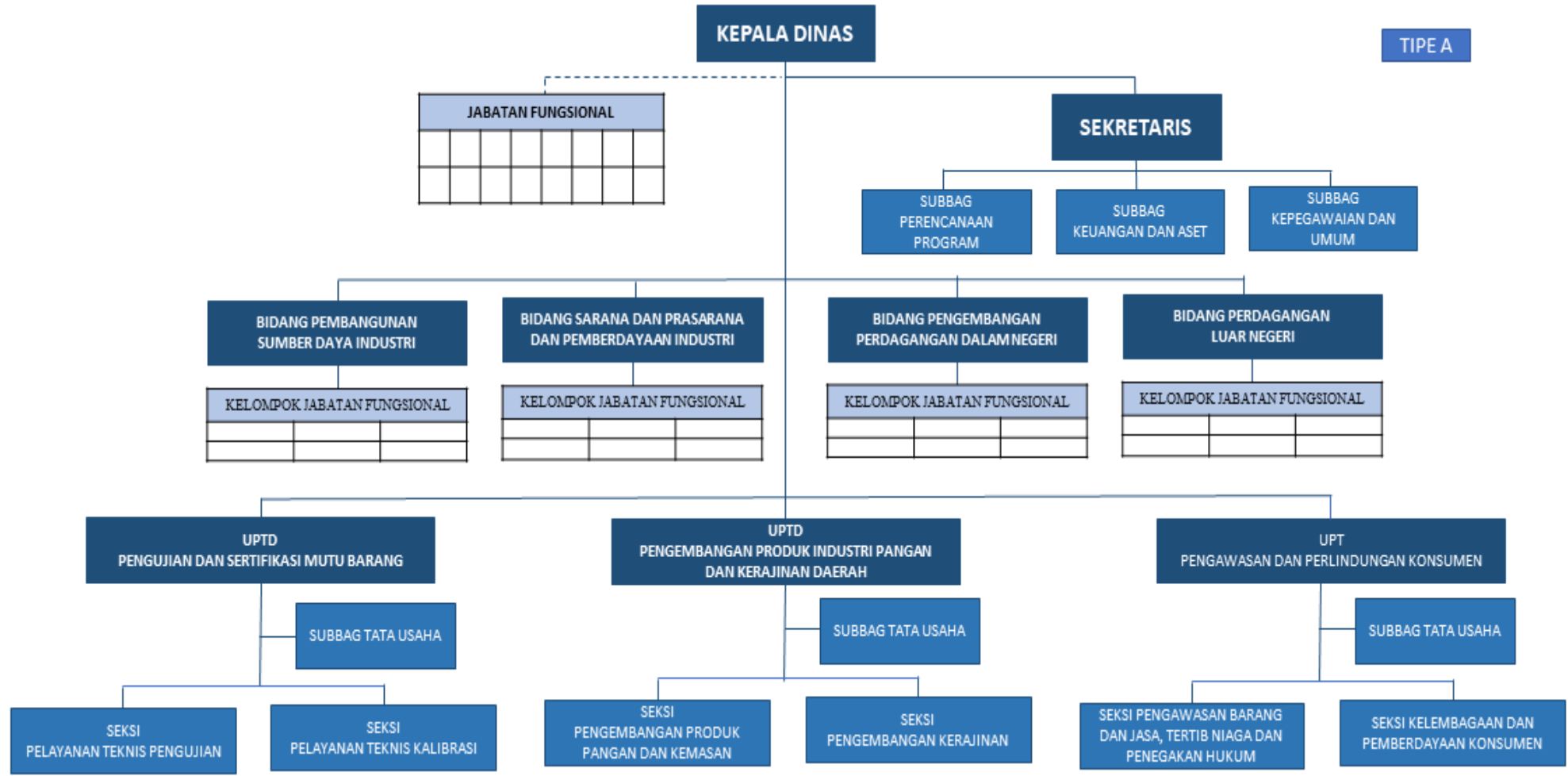
Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 80 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;

- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- g) Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.

2) Struktur Organisasi PD

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang, serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan besaran organisasi sesuai Perda Nomor 57 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. 1 (Satu) Sekretaris dan 3 (Tiga) Sub Bagian
- c. 4 (Empat) Bidang,
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPTD PSMB 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi.
- f. UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi
- g. UPT Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Seksi

Adapun rincian tugas dan wewenang masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan

Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
7. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
2. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum.
3. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum.
4. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.
5. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program.
2. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait.
4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi.
5. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi.
6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
7. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program.
8. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di Lingkungan Instansi terkait.
9. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas.

10. Melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
12. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset.
3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait.
4. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset.
5. Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset.
6. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
7. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah.
8. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah.
9. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset.
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri.
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas.
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum.
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP.
6. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum.
7. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan.
8. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum.
9. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional.
10. Melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
11. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor.
12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Pembangunan Sumberdaya Industri. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi:

1. Perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan wirausaha industri, tenaga kerja industri, dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan provinsi.
2. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Provinsi.
3. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri.
4. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.
5. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama.
6. Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan, usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri besar dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

d. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri.

Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai fungsi:

1. perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
2. Perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur peninjang industry yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
3. Pperumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota.
4. Perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.
5. Perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
6. Perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industry di provinsi.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
8. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri.

e. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan

teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

1. Penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Beralkohol bagi Distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya.
2. Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
3. Pelaksanaan dan monitoring pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi.
4. Pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pelaku usaha distribusi.
5. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi.
6. Pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minimum Beralkohol Toko Bebas Bea dan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya.
7. Rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol bagi distributor.
8. Pemberian layanan sistem informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, perdagangan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
9. Pembinaan pelaku usaha distribusi.
10. Pelaksanaan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, perdagangan antar pulau dan perbatasan,

- pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
11. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi.
 12. Pembentukan tim pengawas dan pemeriksaan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sarana distribusi bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat provinsi.
 13. Pemantauan distribusi, harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
 14. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
 15. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk kesediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
 16. Penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi.
 17. Penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 18. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar da/atau pasar murah dalam rangka stabilitas harga pangan pokok di wilayah kerjanya.
 19. Pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
 20. Penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (K3P Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah provinsi.
 21. Penyusunan neraca produksi dan konsumsi barang yang diantar pulaukan di tingkat daerah provinsi.
 22. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

23. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.

f. Bidang Perdagangan Luar Negeri.

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan memberikan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.
4. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Ekspor Impor, Promosi dan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Pengembangan Ekspor Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dalam hal ini dibawah oleh Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar Negeri.

h. UPT Dinas.

Unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

b. Sumber Daya PD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya-sumber daya manusia dan asset/modal.

1) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, menurut data ASN dan PPPK per Juni 2025 yang menduduki jabatan dan yang tidak menduduki jabatan berjumlah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin per Juni Tahun 2025

No.	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat	11	16	27
2.	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	5	8	13
3.	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	8	8	16
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	7	7	14
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	10	6	16
6.	UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	6	11	17
7.	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	10	7	17
8.	UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	9	10	19
JUMLAH		66	73	139

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Menurut Pendidikan per Juni Tahun 2025

No.	Unit Organisasi	SMA	Diploma	S1	S2	S3	Jumlah
1.	Sekretariat		1	19	7		27
2.	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri			7	6		13
3.	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	1		10	5		16
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			10	3	1	14
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri			9	7		16
6.	UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	1	3	12	1		17
7.	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	1		14	2		17
8.	UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	1		15	3		19
	JUMLAH	4	4	96	34	1	139

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

Tabel 2.3
Keadaan Pegawai Menurut Golongan per Juni Tahun 2025

No.	Unit Organisasi	I	II	III	IV	PPPK	Jumlah
1.	Sekretariat			16	3	8	27
2.	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri			5	4	4	13
3.	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri		1	8	3	4	16
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			5	3	6	14
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri			10	1	5	16
6.	UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang			12	1	4	17
7.	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah		1	13	1	2	17
8.	UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen		1	11	1	6	19
	JUMLAH	-	3	80	17	39	139

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai Menurut Esselon per Juni Tahun 2025

No.	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsional Tertentu	Staf	Jumlah
1.	Sekretariat	1	-	3	-	23	27
2.	Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	-	1	-	-	12	13
3.	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri	-	1	-	-	15	16
4.	Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	-	1	-	-	13	14
5.	Bidang Perdagangan Luar Negeri	-	1	-	-	15	16
6.	UPTD Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	-	1	2	5	9	17
7.	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah	-	1	3	-	13	17
8.	UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	-	1	3	1	14	19
	JUMLAH	1	7	11	6	114	139

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Disperindag

Secara keseluruhan semua jabatan dipegang oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) kemudian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pasca Sarjana. Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan pada bidang memilih tugas dan fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Variasi mandat dalam bentuk organisasi line staf fungsional ini perlu diberi keseimbangan antara mandat teknis dan mandat operasional sehingga saling menunjang, namun tetap memberi perhatian pada lingkup mandat yang bersifat teknis operasional menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah yang berhubungan pengembangan

perindustrian dan perdagangan bersama stakeholder lainnya untuk melakukan upaya pengembangan dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun karena masih ditemui berbagai keterbatasan yang mengganggu, antara lain kemampuan individu aparat yang masih sangat membutuhkan upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional, kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

2) Sumber Daya Aset

Keadaan Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah per Juni 2025 tersaji pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Keadaan Inventaris dan Perlengkapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Jenis Barang	Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Tidak Ditemukan
1	A.C. Split	75		5	3
2	A.C. Window	21			
3	Alat Dapur lainnya	274			
4	Alat Kantor Lainnya	21		7	
5	Alat Kedokteran umum lainnya	1			
6	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	31			

7	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	2			
8	alat laboratorium lain lainnya (dst)	37			
9	Alat Laboratorium lainnya	16			8
10	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	10			
11	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	1			
12	alat laboratorium umum lainnya (dst)	3			
13	Alat Pembantu Kebakaran	5			
14	Alat Pembersih lainnya	5			
15	Alat Penghancur Kertas	1		1	
16	Alat Prosesing lainnya	1			
17	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21			
18	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1			
19	Aqua Bidest Apparatus	1			
20	Bangku Tunggu	1			
21	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1			1
22	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11		1	
23	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	4		1	2
24	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2		1	4
25	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen			1	
26	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen				1
27	Bejana Ukur				2
28	Botol Uji Berbagai Ukuran	50			
29	Brandkas	2			
30	Camera film	3		10	
31	Camera Video	2			
32	Cawan Porselin	12			
33	CCTV - Camera Control Television System	6		2	
34	Coffee Maker	1			
35	Crusible Penyaring	12			
36	Dispenser	17		6	
37	Display	8			
38	Dropping Bottle	6			
39	electric generating set lainnya (dst)	1			
40	Exhause Fan	13			
41	External/ Portable Hardisk			15	
42	Facsimile	1			
43	Filing Cabinet Besi	22			

44	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2			
45	Gedung Pos Jaga Permanen	2			
46	Gelas Piala	12			
47	general laboratory tool lainnya (dst)	1			
48	Generator	1			
49	Generator Set(Lab Scale)	1			
50	Genset	1			
51	Gordyin/Kray	206		1	
52	Hard Disk			2	
53	Humadity Chamber (General Laboratory Tool)	1			
54	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	1			
55	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	1			
56	Jalan Khusus Lainnya			1	5
57	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	1			
58	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA			1	
59	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)			1	
60	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1			
61	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	2			
62	Jeep	2			
63	Kipas Angin	8			
64	Kitchen Set	1			
65	Kompore Gas (Alat Dapur)	4			
66	Kursi Besi/Metal	61			
67	Kursi Biasa	40			
68	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	15			
69	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			25	
70	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10			
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1			
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1	
73	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2		2	
74	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10		9	
75	Kursi Kerja Pejabat lainnya	122		41	
76	Kursi Lipat	15			
77	Kursi Putar	31			
78	Kursi Rapat	124		30	4

79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	5			
80	Kursi Tamu	6			
81	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	71			
82	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1			
83	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	10			
84	Lain-lain				1
85	Lap Top	59		26	5
86	Layar Film/Projector	4			1
87	LCD Projector/Infocus	2			
88	Lemari Arsip Pejabat lainnya	3			
89	Lemari Asam	1			
90	Lemari Besi/Metal	6			
91	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	36		4	2
92	Lemari Display	1			
93	Lemari Es	14			
94	Lemari Kaca	11			
95	Lemari Kayu	4			
96	Local Area Network (LAN)	1			
97	Locker	6			
98	Manometer	12			
99	Meja 1/2 Biro	10		6	
100	Meja Kerja Besi/Metal	23			
101	Meja Kerja Kayu	63		36	2
102	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		2	
103	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9	
104	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4			
105	Meja Komputer	10			
106	Meja Makan Besi	6			
107	Meja Rapat	29			
108	Meja Rapat Pejabat Eselon II			1	
109	Meja Rapat Pejabat Eselon III			3	
110	Meja Rapat Pejabat lainnya	22			
111	Meja Resepsionis	3			
112	mesin ketik lainnya (dst)	1			
113	Mesin Ketik Listrik	10			
114	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3			
115	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1			
116	Mesin Laminating	1			
117	Mesin Pemotong Rumput	4			
118	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1		2	

119	Mesin Penghitung Uang	1		1	
120	Meubeleur lainnya	127			
121	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1			
122	Muffie Furnace	1			
123	Note Book	7		4	
124	Oven (Alat Laboratorium Umum)	33			
125	Oven Listrik	1			
126	P.C Unit	93		43	
127	Pagar Permanen	1			
128	Papan Nama Instansi	1		4	
129	Papan Pengumuman	8		1	
130	Papan Visual/Papan Nama	3		2	
131	Partisi	35			
132	Pengurus Barang				
133	Peralatan Komputer lainnya	1			
134	Peralatan Personal Komputer lainnya	24		15	
135	peralatan studio audio lainnya (dst)	2			
136	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	1			
137	Personal Komputer lainnya	1		1	
138	Pesawat Telephone	1			
139	Pick Up	1			
140	Pompa Air	1			
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	110		24	
142	Rak Besi	1			
143	Rice Cooker (Alat Dapur)	1			
144	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen		1		
145	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen			1	
146	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen			1	
147	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2			
148	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6			
149	Scooter	8			
150	Sepeda Motor	48		2	
151	Sofa	10			
152	Sound System	8			
153	Station Wagon	11			
154	Sumur Gali (SGL)	2			
155	Tablet PC	3			
156	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6			

157	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1			
158	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	1			
159	Tangga Aluminium	3			
160	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	29			
161	Telephone Mobile	2			
162	Televisi	25			
163	Tenda			5	
164	Tenda Sangga	7			
165	Termometer Standar	2			
166	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	1			
167	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	1			
168	Timbangan Elektronik	1			
169	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2			
170	Tips Pipet Sesuai Ukuran	12			
171	Tool Kit Set	10			
172	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	1			
173	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik)	1			
174	TV Monitor			2	
175	Wireless			2	
176	Wireless Amplifier	1			
Jumlah		2.498	1	361	41

c. Kinerja pelayanan PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Disperindag dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel pencapaian Kinerja Pelayanan yang tersaji pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja															Rata-rata Target RPJMD	Interpretasi Sangat Tinggi (91% ≤ 100%) Tinggi (76% ≤ 90%) Sedang (66% ≤ 75%) Rendah (51% ≤ 65%) Sangat Rendah (≤50%)		
		2020			2021			2022			2023			2024						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
A. IKU / IKD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah																				
1.	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	5,85	5,85	100,00	6,7	5,28	78,81	6,80	4,77	70,15	5,8	5,04	86,90	5,9	4,87	82,54	83,68	Tinggi		
2.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	25,55	25,55	100,00	11,37	31,86	280,21	11,69	37,59	321,56	32,00	37,19	116,22	41,00	37,08	90,44	181,69	Sangat Tinggi		
B. IKK Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah																				
3.30 Perdagangan																				
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	5.095,60	5.095,60	100,00	3.828,92	4.986,17	130,22	5.203,94	8.659,53	166,40	9.525,71	10.222,21	107,31	10.668,80	10.540,85	98,80	120,55	Sangat Tinggi		
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	5,8	103,33	4-6	10,81	19,83	4-6	7,9	68,33	4-6	6,9	85,00	4-6	5,70	105,00	76,30	Tinggi		
3	Inflasi pangan berkejang (%)	3-5	2,5	106,67	3-5	2,58	114,00	3-5	2,95	101,67	3-5	0,52	182,67	3-5	1,07	164,33	133,87	Sangat Tinggi		
3.31 Perindustrian																				
1	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	823	823,00	100,00	1.097	11.092,96	1.011,21	1.371	17.087,26	1.246,34	13.000	17.106,95	131,59	16.000	17.828,09	111,43	520,11	Sangat Tinggi		
2	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.735	67.735	100,00	67.823	101.240	149,27	67.911	133.240	196,20	134.490	134.900	100,30	136.000	135.160	99,38	129,03	Sangat Tinggi		
3	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	13,83	100,00	13,83	13,83	100,00	11-14	12,43	88,79	11-14	15,23	108,79	11-14	14,34	102,42	100,00	Sangat Tinggi		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, 2025 (Data diolah kembali)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindag berdasarkan sasaran/target Renstra PD selama periode 2020-2024 secara keseluruhan terdapat 8 indikator kinerja. Dari 8 indikator kinerja tersebut, sebanyak 6 indikator kinerja memiliki rata-rata capaian sangat tinggi dan 2 indikator kinerja dengan rata-rata capaian tinggi.

A. Urusan Perdagangan

Kontribusi PDRB sektor perdagangan khususnya perdagangan besar dan eceran pada periode tahun 2021 sebesar 5,28% dengan target 6,7% dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 4,77 dengan target 6,80%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,04% dengan target 5,8% dan pada tahun 2024 target dinaikan menjadi 5,9% tetapi realisasi mengalami penurunan menjadi 4,87. Sejak periode tahun 2021 sd. 2024 realisasi dibawah target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pada periode ini didominasi pertumbuhan sektor industri pengolahan, percepatan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah mendorong pembangunan dan operasional pabrik smelter nikel yang begitu pesat di kawasan industri morowali dan sekitarnya. Sejalan dengan hilirisasi nikel, sektor pertambangan juga tumbuh signifikan di Sulawesi Tengah. Perkembangan dua sektor ini menimbulkan efek domino yang menggeser porsi kontribusi dari sektor lainnya termasuk sektor perdagangan, meskipun sektor perdaganga tetap tumbuh positif. Pada periode 2021-2022 dampak Pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas ekonomi termasuk perdagangan. Pembatasan mobilitas dan perubahan perilaku konsumen menahan laju pertumbuhan sektor perdagangan.

Untuk indikator nilai ekspor bersih perdagangan sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana nilai ekspor bersih pada tahun 2021 adalah 4,986.17 (Juta USD) menjadi 10,540.85 (Juta USD) pada tahun 2024. Pada tahun 2021 peningkatan ekspor dikontribusi oleh sektor besi dan baja dimana sektor ini memiliki perubahan sebesar 67,52 % dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan beberapa tenant tenant baru sudah melakukan aktifitas produksi dan pengiriman barang, dimana tahun sebelumnya masih tahap pembangunan. Walaupun kondisi impor juga mengalami

peningkatan signifikan tetapi karena besar aktifitas ekspor sehingga ekspor bersih dapat melampaui target. Pada tahun 2023 ke 2024 pertumbuhan nilai ekspor mengalami perlambatan dikarenakan nilai atau harga nikel dan turunan mengalami penurunan walau secara volume mengalami peningkatan pengiriman dari tahun sebelumnya.

Pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 persentase stabilitas barang kebutuhan pokok terus mengalami peningkatan, menunjukkan perbaikan kinerja pengendalian stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, meskipun masih berada dibawah target tahunan. Dimana pada tahun 2021 sebesar 10,81%, tahun 2022 mencapai 7,9%, tahun 2023 sebesar 6,9% dan pada tahun 2024 mencapai 5,7% dengan target sebesar 4 – 6 % setiap tahunnya. Pada periode 2021 hingga 2024, stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Sulawesi Tengah menghadapi tantangan, meskipun pemerintah daerah dan pusat terus melakukan intervensi. Kenaikan harga masih sering terjadi, terutama pada komoditas pangan. Hal ini dipengaruhi ketersediaan beberapa komoditas pangan masih tergantung pasokan dari luar wilayah Sulteng meskipun Sulawesi Tengah memiliki sektor pertanian yang kuat. Faktor iklim seperti El Nino, hama dan penyakit tanaman mempengaruhi proksi hasil pertanian.

Sedangkan perkembangan inflasi pangan berkejolak Periode tahun 2021 – 2024 mengalami peningkatan kinerja dan pertumbuhan positif. Dimana pada tahun 2021 sebesar 2,58%, tahun 2022 sebesar 2,95%, tahun 2023 sebesar 0,52% dan tahun 2024 sebesar 1,07% dengan target 3-5% setiap tahunnya. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan proaktif, intervensi pasar melalui kegiatan pasar murah dan operasi pasar khususnya pada saat hari-hari besar keagamaan nasional, penguatan mekanisme pemantauan harga dan ketersediaan stok di pasar rakyat dan distributor sebagai deteksi dini mengidentifikasi ketidakseimbangan pasokan atau fluktuasi harga, koordinasi lintas sektor yang baik, melakukan pengawasan rutin bersama satgas pangan dan melakukan pembinaan dan penindakan

terhadap pelanggaran perdagangan, serta menjaga komunikasi publik dengan mendukung pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

B. Urusan Perindustrian

Industri pengolahan memainkan peran penting dalam perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi utama terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat yakni dari 31,86 % di tahun 2021 menjadi 37,08 % pada tahun 2024. Kontribusi PDRB industri pengolahan non migas di Sulawesi Tengah memiliki trend kenaikan secara signifikan dan selalu berada di atas target RPJMD kecuali pada 2024 yang sedikit meleset. Hal ini disebabkan oleh: 1. Harga komoditas global (terutama nikel) yang sangat berpengaruh. 2. Investasi industri smelter yang terus meningkat di Morowali, Bahodopi, dan sekitarnya. 3. Permintaan ekspor yang tinggi seiring tren kendaraan listrik dan energi hijau. 4. Stabilitas ekonomi nasional dan global yang memengaruhi daya saing sektor pengolahan.

Untuk nilai ekspor produksi industry non-migas mengalami peningkatan dimana pada tahun 2021 nilainya 11,092.96 (USD Juta) menjadi 17,828.09 (USD Juta). Kenaikan nilai ekspor produksi industry non-migas umumnya dianggap baik bagi perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa industry non migas Provinsi Sulawesi Tengah memiliki daya saing yang baik di pasar global dan mampu menarik permintaan dari negara lain. Nikel adalah salah satu komoditas unggulan dan penyumbang utama ekspor non migas di Provinsi Sulawesi Tengah. Komoditas ekspor lainnya meliputi besi dan baja. Jumlah tenaga kerja di sektor industry sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2021 terdapat 101,240 (Jiwa) dan pada tahun 2024 terdapat 135,160 (Jiwa). Sedangkan untuk cakupan bina pelaku IKM juga mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Trendline 2021–2024 selalu melebihi target, menunjukkan kekuatan

sektor industri pengolahan non-migas Sulawesi Tengah. Faktor dominan yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

- Fluktuasi harga nikel global.
- Ekspansi industri smelter di Morowali dan sekitarnya.
- Permintaan ekspor internasional yang terus meningkat karena kebutuhan energi hijau.

Adapun fluktuasi capaian pada Tahun 2021 ke 2022 yang mana capaian sangat besar karena lonjakan harga dan permintaan. Sedangkan pada 2023–2024 capaian tetap tinggi, tapi lebih stabil karena pasar mulai menyesuaikan.

Jumlah tenaga kerja di sektor industri naik signifikan 2021–2022, seiring dengan boom investasi dan lonjakan harga nikel global. 2023–2024 relatif stabil, dengan pencapaian target hampir 100%, menandakan sektor industri sudah masuk fase konsolidasi (tidak lagi ekspansi besar-besaran seperti sebelumnya). Beberapa faktor utama yang memengaruhi: Investasi dan ekspansi industri smelter, harga dan permintaan global komoditas (nikel, stainless steel, CPO) dan Peralihan ke teknologi modern yang sedikit menekan kebutuhan tenaga kerja manual.

Tahun 2021–2024 secara umum capaian sesuai target, bahkan beberapa tahun melampaui. Faktor utama keberhasilan: konsistensi program pembinaan, dukungan kebijakan pusat, dan adaptasi digital oleh pelaku IKM. Kendala yang sempat muncul: keterbatasan anggaran, akses ke daerah terpencil, dan dampak pandemi. Tren positif ini menunjukkan bahwa pembinaan IKM di Sulawesi Tengah berjalan efektif dalam mendukung daya saing sektor industri kecil dan menengah.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PENDAPATAN DAERAH														
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	411,000,000	275,500,000	268,000,000	300,766,900	247,443,885	333,057,525	403,561,430	208,907,750	60.21	120.89	150.58	69.46	17.43	12.26
Hasil Retribusi Daerah	394,500,000	258,000,000	250,000,000	235,766,900	236,443,885	321,057,525	385,561,430	190,907,750	59.94	124.44	154.22	80.97	13.4	12.76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16,500,000	17,500,000	18,000,000	65,000,000	11,000,000	12,000,000	18,000,000	18,000,000	66.67	68.57	100.00	27.69	74.14	15.69
JUMLAH PENDAPATAN	411,000,000	275,500,000	268,000,000	300,766,900	247,443,885	333,057,525	403,561,430	208,907,750	126.601745	120.89	150.58	69.46	17.43	12.26
Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata pertumbuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA DAERAH	33,940,486,619	28,658,806,379	32,119,116,666	31,600,058,296	30,054,871,223	27,243,917,500	30,329,441,541	28,695,839,348	88.55	95.06	94.43	90.81	2.52	0.85
- Belanja Pegawai	11,824,952,572	11,270,535,253	11,677,200,481	12,791,424,302	10,408,928,751	10,682,273,963	10,374,036,564	10,655,829,859	88.03	94.78	88.84	83.30	-0.11	-3.29
- Belanja Barang / Jasa	16,000,973,483	14,739,372,001	19,086,530,535	15,474,074,064	14,736,967,472	13,991,661,122	18,621,286,577	14,881,143,489	92.10	94.93	97.56	96.17	11.52	11.11
- Belanja Hibah	1,200,000,000	850,000,000	800,000,000	800,000,000	1,200,000,000	850,000,000	789,666,900	800,000,000	100.00	100.00	98.71	100.00	-11.68	-11.65
- Belanja Modal	4,914,560,564	1,798,899,125	555,385,650	2,534,559,930	3,708,975,000	1,719,982,415	544,451,500	2,358,866,000	75.47	95.61	98.03	93.07	54.05	46.35
JUMLAH BELANJA	33,940,486,619	28,658,806,379	32,119,116,666	31,600,058,296	30,054,871,223	27,243,917,500	30,329,441,541	28,695,839,348	88.55	95.06	94.43	90.81	2.52	0.85

d. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan fungsi pelayanan memiliki mitra kerja sebagaimana berikut :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pemberian rekomendasi izin usaha industri dan izin usaha perdagangan;
- 2) Kantor Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Tengah untuk menerbitkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) IKM;
- 3) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu untuk menerbitkan sertifikat Label Halal IKM;
- 4) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pantoloan untuk Layanan Ke Pabeanan Klinik Ekspor Sulteng;
- 5) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu (BP2MHKP) untuk Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan komoditi Ekspor;
- 6) Eksport Center Makassar sebagai mentor layanan Klinik Ekspor Sulteng;
- 7) Laboratorium Penguji Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Manado (Sulawesi Utara) untuk pengujian sertifikasi mutu;
- 8) Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sulawesi Tengah untuk Layanan Pengembangan Kerajinan di Sulawesi Tengah;
- 9) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

e. Kerjasama Perangkat Daerah

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan perindustrian dan urusan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Sulawesi Tengah dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan Berbadan Hukum Nomor : 535/VIII/Disperindag/2022 dan Nomor : W24.HM.05.04-4672/2022 tanggal 19 Agustus Tahun 2022.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Fakultas Ekonomi Universitas Tadulako tentang Kemitraan Pertumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Nomor : 100.3,7/2.769/ Disperindag Tanggal 21 Maret Tahun 2023;
- 3) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako tentang Kemitraan Pertumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Nomor : 100.3,7/2.770/ Disperindag Tanggal 21 Maret Tahun 2023;
- 4) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Fakultas Teknik Universitas Tadulako tentang Kemitraan Pertumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Nomor : 100.3,7/2.771/ Disperindag Tanggal 21 Maret Tahun 2023;

- 5) Kesepakatan Implementasi Kerjasama Antara Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan Inkubator Bisnis Teknologi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Praktisi Mengajar/ dan Penelitian)serta kemitraan dalam mengimplementasi program MBKM yaitu Magang dan Riset Nomor: 8428/UN28.1.23/2024 tanggal 06 Agustus Tahun 2024.
- 6) Kesepakatan Implementasi Kerjasama Antara Program Studi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako dengan UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) tentang Pelaksanaan Kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Praktisi Mengajar/ dan Penelitian) tanggal 20 Agustus Tahun 2024.
- 7) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako tentang Tridarma Perguruan Tinggi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nomor : 800.1/118/ Sekretariat dan Nomor : 633/UN28.1.13/KS/2025 Tanggal 20 Februari Tahun 2025;
- 8) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 800.2.2.1/455/Disperindag dan Nomor : 6721/UN28.4/KM/2025 Tanggal 18 Juni Tahun 2025;

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi pada permasalahan pokok dan akar masalah. Permasalahan pokok dan akar masalah tersebut berdasarkan analisis evaluasi capaian indikator kinerja visi misi pembangunan daerah. Sebagai perbandingan pencapaian antara realisasi kinerja pembangunan saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk memberikan penguatan pada perumusan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 permasalahan pembangunan dapat diidentifikasi dan dianalisis didasarkan pada tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi dibidang perindustrian dan perdagangan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data kondisi saat ini, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi tersebut, Dinas Perindag menghadapi beberapa permasalahan umum sebagaimana tersaji pada tabel 2.8 :

Tabel 2.8
Uraian Masalah dan Faktor Penghambat

No	Masalah Pokok	Masalah	Faktor Penghambat
1	2	3	4
1	1. Perekonomian Daerah belum sepenuhnya tangguh dan inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi harga barang konsumsi terutama harga bahan pokok sering berubah-ubah; 2. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan; 3. Lemahnya daya saing produk lokal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha; 2. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli; 3. Hasil pemasaran pertanian yang diterima oleh petani relatif rendah apalagi pada saat panen dan mengalami kelebihan stock; 4. Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal; 5. Sarana dan prasarana perdagangan masih belum memadai seperti sarana pasar/pertokoan yang letaknya strategis ditempati oleh pengusaha golongan menengah ke atas, sedang lokasi kurang strategis ditempati pengusaha golongan ekonomi lemah; 6. Masih kurangnya informasi pasar luar negeri yang diterima secara cepat dan kontinyu; 7. Nilai Ekspor daerah masih didominasi ekspor sector industry besi dan baja. 8. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi; 9. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (Pto G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G); 10. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat; 11. Kondisi ekonomi global, dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk industri lokal kurang berkembang karena kurangnya promosi; 2. Minimnya akses permodalan industri kecil menengah terhadap perbankan; 3. Lemahnya daya saing produk industri kecil menengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasaran hasil-hasil industri belum maksimal karena masih rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri serta harga yang belum memenuhi selera konsumen; 2. Produk industri lokal kurang berkembang karena kurangnya promosi dan pemasarannya masih bersifat lokal; 3. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha; 4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai; 5. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta informasi yang valid dan uptodate terkait dengan pelaku usaha;

		<ol style="list-style-type: none">6. Rendahnya produktivitas dan efisiensi teknis produk industri. Peralatan dan cara kerja masih sederhana, sehingga kualitas produksi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan;7. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi;8. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastawan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;9. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang berpengaruh terhadap harga jual produk;10. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.
--	--	--

Meskipun menghadapi berbagai macam permasalahan, secara umum kualitas penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menerus mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Beberapa indikator yang menjadi pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut mencakup:

- **Urusan Perdagangan**

- 1) Menguatnya kelembagaan perdagangan dalam negeri.
- 2) Bertambahnya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan.
- 3) Semakin membaiknya kondisi pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 4) Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong sektor perdagangan dalam negeri.
- 5) Menguatnya kelembagaan perdagangan dalam luar negeri.
- 6) Bertambahnya Fasilitas sarana dan prasarana perdagangan luar negeri.
- 7) Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi.

- 8) Semakin membaiknya kondisi pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan laut dan bandara) di Provinsi Sulawesi Tengah.
- 9) Adanya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong ekspor komoditas unggulan.
- 10) Tumbuhnya wirausaha baru.

- **Urusan Perindustrian**

- 1) Menguatnya kelembagaan fasilitasi dan informasi Industri.
- 2) Meningkatnya fasilitasi pengembangan usaha industri.
- 3) Bertambahnya fasilitasi sarana dan prasarana industri.
- 4) Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan promosi industri.
- 5) Meingkatkan industri E-commerce.
- 6) Meningkatkan kesadaran terhadap penerapan standar industri.
- 7) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan perwilayahan industri.

b. Isu strategis

Penentuan isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.9 Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS DAERAH	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8
Potensi sumber daya alam	Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan /Kelautan, Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan belum Optimal	Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal	Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan	Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah. 3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.

<p>Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup</p>	<p>Hilirisasi Sektor Pertanian, Perikanan /Kelautan, Pariwisata dan Pengelolaan Hasil Pertambangan belum Optimal</p>	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal</p>	<p>Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p>	<p>Memantapan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital dan ekonomi biru</p>	<p>Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang tingkat kemiskinan</p>	<p>Rendahnya Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan, Perikanan dan Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor. 4. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang
--	--	---	--	--	---	--	---

							beredar dan tertib niaga; 5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.
Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Kondisi Infrastruktur dan Konektivitas belum optimal dan merata	Peningkatan kualitas dan daya saing sector unggulan daerah, serta infrastruktur penghubung antar wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian fiscal	Perkembangan Teknologi	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Tingginya ketimpangan antarkelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur daerah	Inovasi Pembiayaan Pembangunan dalam Mendukung Kesenambungan	1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri. 2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Visi Abadi Indonesia termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah diterjemahkan ke dalam Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, maka daerah khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu menjadi jembatan dalam penyelenggaraan pembangunannya. Sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045, dalam tahap awal periode 2025-2029, Sulawesi Tengah perlu membenahi dan melakukan perkuatan fondasi, hingga nantinya dapat dilanjutkan pada tahapan akselerasi transformasi dan ekspansi global di segala bidang pada akhir periode hingga terwujudnya Sulawesi Tengah Emas di Tahun 2045.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban. Visi ini selanjutnya dijabarkan dalam Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.

Sebelum menjabarkan Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 adalah **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri**

Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” Substansi Visi RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan. Provinsi Sulawesi Tengah terus bertransformasi menjadi pusat ekonomi global di Kawasan Timur Indonesia dengan pembangunan antar wilayah yang merata, peningkatan pelayanan publik yang inovatif dan didukung oleh ketersediaan sarana prasarana (infrastruktur) serta sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, memiliki kualitas dan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, inovatif, dan memiliki derajat kesehatan yang baik serta kondisi kehidupan sosial yang harmoni.

Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya berhasil mencapai pendapatan tinggi sehingga kesejahteraan meningkat ditunjang oleh produktivitas pertanian, kemaritiman, pariwisata, pertambangan, perdagangan, jasa perkotaan dan industri berbasis sumber daya alam yang menjadi mesin pertumbuhan (engine of growth) ekonomi yang tinggi. Sulawesi Tengah sebagai wilayah Indonesia yang hijau, ekologis dan produktif memiliki kemampuan yang tinggi dalam pembiayaan pembangunan. Juga melaksanakan aktivitas ekonomi hijau, ekonomi biru dan bioekonomi yang dilakukan secara lestari dan seimbang serta melaksanakan pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan ketangguhan Masyarakat Sulawesi Tengah terhadap bencana. Hal ini akan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang aman, nyaman dan produktif serta layak huni. Berangkat dari hal di atas, maka harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Agar Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang maju dan sejahtera dalam lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Untuk itu,

Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih menetapkan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 yaitu:

“ Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029 ”

Sesuai dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka perencanaan terintegrasi melalui desain kerangka berpikir logis sederhana dituangkan ke dalam rumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD

Misi 2: Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Perwujudan dari masyarakat Sulawesi Tengah yang bahagia dan produktif dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas unggulan daerah, PDRB sektor unggulan daerah serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran yaitu meningkatnya nilai investasi daerah, PDRB sektor industri pengolahan, pendapatan asli daerah dan daya saing serta produktivitas ekonomi sektoral.

Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan tersebut juga memerlukan penguatan sektor unggulan yang merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam upaya meningkatkan PDRB sektor unggulan daerah tersebut bertumpu pada sasaran meningkatnya PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pariwisata serta meningkatnya peran koperasi dan UMKM. Semuanya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

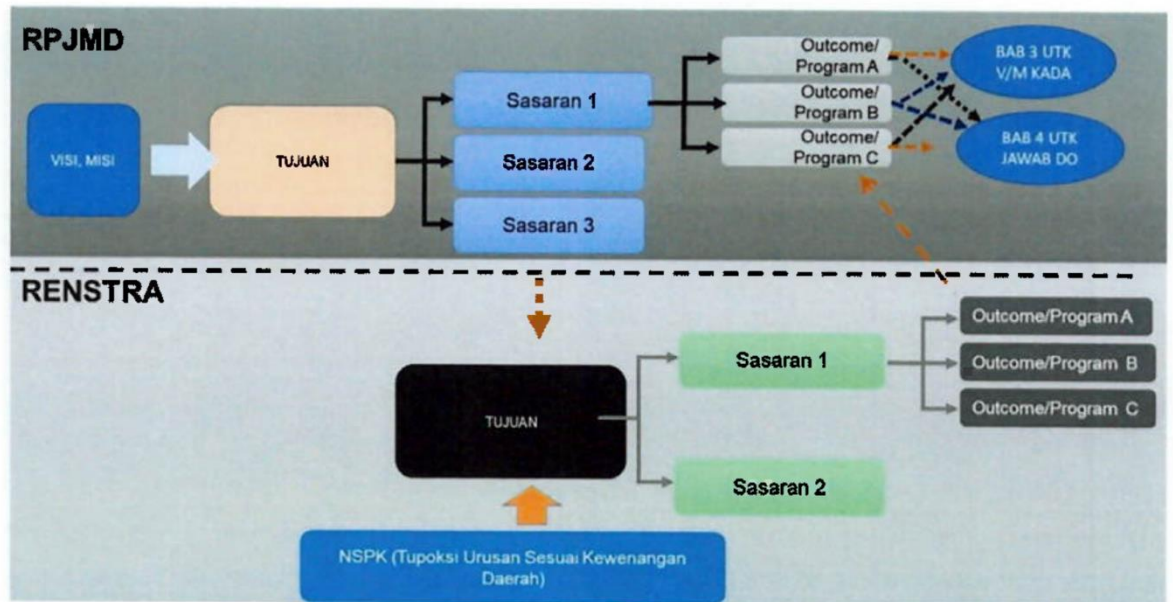
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang menjadi sasaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan antara lain menurunnya ketimpangan pendapatan antar wilayah, dalam hal ini terjadi pemerataan distribusi pendapatan, misalnya dalam hal peningkatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif atau melalui diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan mendorong industri baru di berbagai wilayah, sehingga dapat membantu meningkatkan PDRP Per Kapita di Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 3.1.
Logframe Tujuan 1 dan Sasaran pada Misi 2

3.3 Tujuan RENSTRA PD

Merujuk pada INMEN Nomor 02 Tahun 2025, penyusunan Tujuan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah sasaran strategis yang tertera pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029.



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Adapun Tujuan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

”Meningkatkan PDRB sektor Unggulan Daerah”

Hubungan antara Sasaran Strategis RPJMD dan RENSTRA PD digambarkan dalam cascading sebagai berikut:



Gambar 3.3.

Logframe Sasaran RPJMD dan Tujuan RENSTRA PD

3.4 Sasaran RENSTRA PD

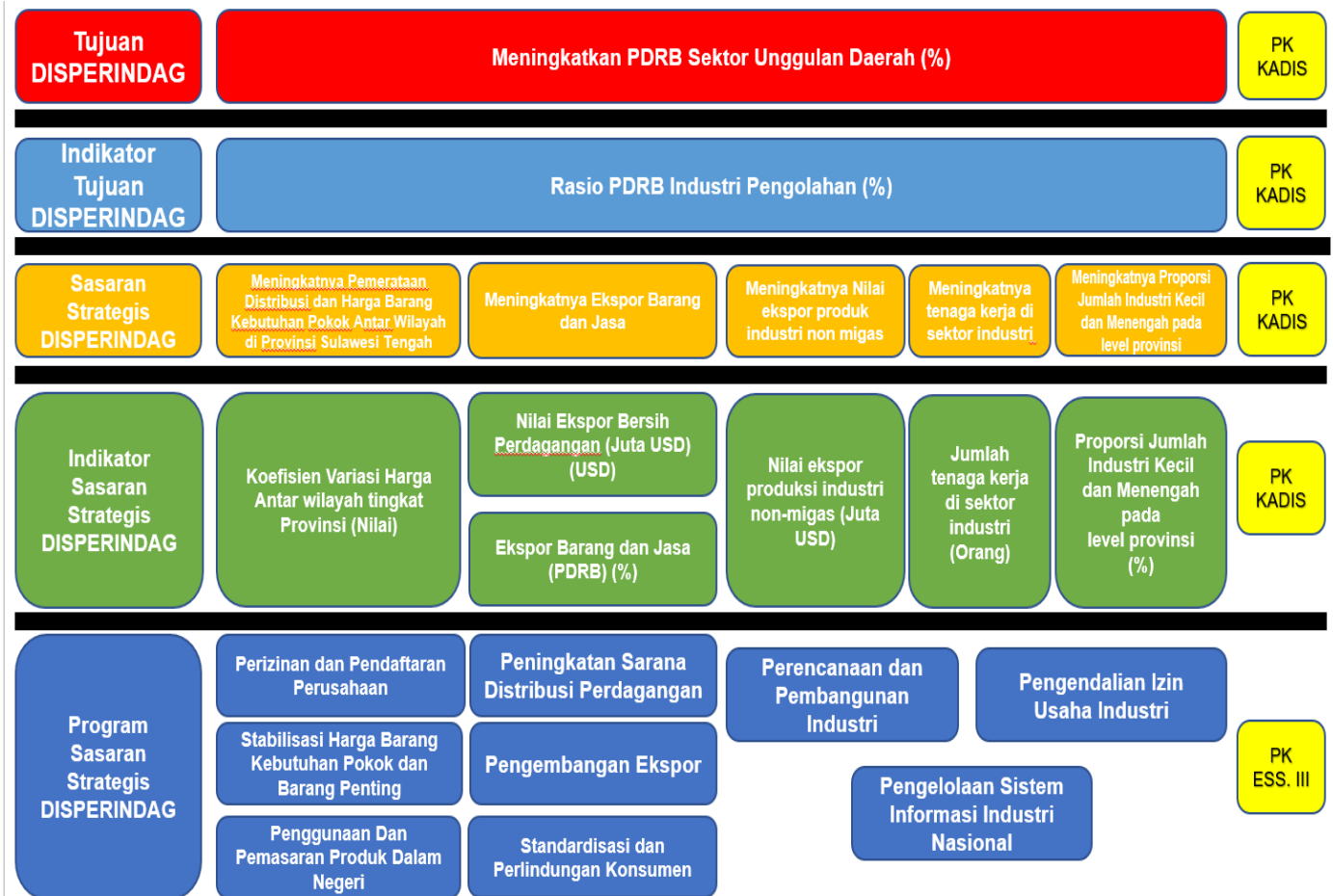
Dalam mendukung proses peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas sektor unggulan, telah dirumuskan tujuan, sasaran dan indikator RENSTRA PD, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,18	40,97-41,45	41,5-42,48	42,5-43,99	43,5-45,49	47,00-50,99	48,51-51,1	
		Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Provinsi (%)	7,4	11,1	10,93	10,75	10,58	10,4	10,23	
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40	
			Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)	159,47	90,74 - 92,16	92,80 – 94,15	94,91 – 96,50	96,50 – 98,79	98,80 – 101,20	101,20 – 103,16	
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas (Juta USD)	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20.116,00	
		Meningkatnya tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (Orang)	135.160	135.417,00	135.674,00	135.931,00	136.188,00	136.445,00	136.702,00	
		Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)	1,21	1,31	1,51	1,72	1,92	2,12	2,32	

Adapun cascading tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan sebagai berikut :



Gambar 3.4
Cascading Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD

3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029

Strategi menempati posisi strategis sebagai penghubung antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dengan strategi serta program kerja daerah. Strategi berfungsi sebagai pedoman umum yang mengarahkan bagaimana berbagai program pembangunan akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, strategi dan arah

kebijakan memiliki hubungan hirarkis yang saling melengkapi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Strategi merupakan pedoman umum yang menentukan prioritas dan pendekatan pembangunan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Strategi bersifat lebih makro, konseptual, dan normatif, memberikan landasan bagi penyusunan strategi serta memastikan pembangunan daerah selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan adanya strategi, setiap sasaran pembangunan memiliki koridor yang jelas, sehingga kebijakan daerah dapat diimplementasikan secara sistematis dan terarah.

Adapun pentahapan rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2
Pentahapan RENSRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

STRATEGI				
Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas sektor unggulan daerah				
Sasaran: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah				
Pemetaan rantai pasok sektor unggulan (pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata)	Pelatihan hilirisasi produk unggulan dan pendampingan kelompok tani/nelayan	Pembangunan infrastruktur produksi dan pascapanen sektor unggulan	Penguatan ekosistem sektor kreatif, wisata, dan pengolahan lokal berbasis digital	Penguatan sistem dukungan pertumbuhan sektor unggulan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota
Revitalisasi BUMDes dan koperasi sektor produksi	Penguatan model klaster komoditas unggulan wilayah	Peningkatan akses pasar nasional dan ekspor	Penguatan branding dan pemasaran produk unggulan berbasis wilayah	Penguatan peran daerah dalam pengembangan sektor unggulan melalui koordinasi lintas sektor dan wilayah
Tujuan : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah (%)				
Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi				
Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan

Meningkatkan Pengendalian Pusat Distribusi dengan mendorong revitalisasi, standarisasi, dan pengelolaan pasar rakyat, PLK, dan SRG.	Meningkatkan Pengendalian Pusat Distribusi dengan mendorong revitalisasi, standarisasi, dan pengelolaan pasar rakyat, PLK, dan SRG.	Meningkatkan Pengendalian Pusat Distribusi dengan mendorong revitalisasi, standarisasi, dan pengelolaan pasar rakyat, PLK, dan SRG.	Meningkatkan Pengendalian Pusat Distribusi dengan mendorong revitalisasi, standarisasi, dan pengelolaan pasar rakyat, PLK, dan SRG.	Meningkatkan Pengendalian Pusat Distribusi dengan mendorong revitalisasi, standarisasi, dan pengelolaan pasar rakyat, PLK, dan SRG.
Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida
Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
Meningkatkan standarisasi dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	Meningkatkan standarisasi dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	Meningkatkan standarisasi dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	Meningkatkan standarisasi dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	Meningkatkan standarisasi dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen
Sasaran : Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa				
Meningkatkan promosi dagang produk orientasi ekspor dan citra produk potensi ekspor	Meningkatkan promosi dagang produk orientasi ekspor dan citra produk potensi ekspor	Meningkatkan promosi dagang produk orientasi ekspor dan citra produk potensi ekspor	Meningkatkan promosi dagang produk orientasi ekspor dan citra produk potensi ekspor	Meningkatkan promosi dagang produk orientasi ekspor dan citra produk potensi ekspor
Meningkatkan fasilitasi layanan SKA dan Klinik Ekspor	Meningkatkan fasilitasi layanan SKA dan Klinik Ekspor	Meningkatkan fasilitasi layanan SKA dan Klinik Ekspor	Meningkatkan fasilitasi layanan SKA dan Klinik Ekspor	Meningkatkan fasilitasi layanan SKA dan Klinik Ekspor
Sasaran : Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas				
Mendorong Identifikasi dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM	Mendorong Identifikasi dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM	Mendorong Identifikasi dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM	Mendorong Identifikasi dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM	Mendorong Identifikasi dan pengembangan kawasan industri dan sentra IKM
Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri
Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri
Sasaran : Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri				
Mendorong Kemitraan industri dengan dunia pendidikan (link and match)	Mendorong Kemitraan industri dengan dunia pendidikan (link and match)	Mendorong Kemitraan industri dengan dunia pendidikan (link and match)	Mendorong Kemitraan industri dengan dunia pendidikan (link and match)	Mendorong Kemitraan industri dengan dunia pendidikan (link and match)
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatkan

Fasilitasi vokasi	Fasilitasi vokasi	Fasilitasi vokasi	Fasilitasi vokasi	Fasilitasi vokasi
Mendorong identifikasi potensi SDA Unggulan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi industry.	Mendorong identifikasi potensi SDA Unggulan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi industry.	Mendorong identifikasi potensi SDA Unggulan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi industry.	Mendorong identifikasi potensi SDA Unggulan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi industry.	Mendorong identifikasi potensi SDA Unggulan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, kreativitas, dan inovasi industry.
Sasaran : Meningkatkan Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi				
Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri
Meningkatkan Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku IKM	Meningkatkan Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku IKM	Meningkatkan Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku IKM	Meningkatkan Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku IKM	Meningkatkan Pelatihan teknis dan manajerial untuk pelaku IKM
Meningkatkan Fasilitasi standardisasi seperti sertifikasi halal/SNI, TKDN, HKI, dan desain produk.	Meningkatkan Fasilitasi standardisasi seperti sertifikasi halal/SNI, TKDN, HKI, dan desain produk.	Meningkatkan Fasilitasi standardisasi seperti sertifikasi halal/SNI, TKDN, HKI, dan desain produk.	Meningkatkan Fasilitasi standardisasi seperti sertifikasi halal/SNI, TKDN, HKI, dan desain produk.	Meningkatkan Fasilitasi standardisasi seperti sertifikasi halal/SNI, TKDN, HKI, dan desain produk.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan penjabaran teknis dan operasional dari arah kebijakan, yang menggambarkan langkah-langkah spesifik untuk mewujudkan sasaran pembangunan. Arah kebijakan disusun dengan mempertimbangkan isu strategis melalui analisis potensi dan tantangan daerah agar pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 berdasarkan misi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	Mewujudkan masyarakat bahagia dan produktif melalui peningkatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan	1 Pelaksanaan promosi di forum nasional dan internasional	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik	
		2 Penguatan sektor unggulan melalui pelatihan hilirisasi, pembangunan infrastruktur produksi, dan branding produk lokal	2 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	
		3 Penerapan teknologi berbasis blockchain dalam rantai pasok industri	3 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi	
		4 Pembangunan infrastruktur distribusi pangan untuk daerah rawan ketahanan pangan	4 Penguatan sistem distribusi dan logistik.	
		5 Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha	5 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	
		6 Pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar siap masuk ke pasar kerja	6 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	
		7 Pengembangan program pelatihan berbasis keterampilan teknis dan wirausaha	7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan	
		8 Pemberian sertifikasi kompetensi bagi peserta pelatihan agar siap masuk ke pasar kerja	8 Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	
		9 Penguatan ekosistem startup berbasis ekonomi digital dan industri kreatif	9 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor	
		10 Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	10 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk	
		11 Pengembangan kawasan sentra garam	11 Perlindungan konsumen dan tertib niaga.	
		12 Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut	12 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	
		13 Pengembangan kawasan sentra garam	13 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi IKM	
		14 Fasilitasi sertifikasi produk pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk ekspor	14 Peningkatan kualitas SDM industri.	
		15 Diversifikasi produk ekspor berbasis nilai tambah	15 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri	
		16 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis Mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali	16 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	

	Utara		
	17 Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai	17 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
	18 Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral di daerah strategis	18 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri	
	19 Pengembangan kawasan perkotaan kecil berbasis Industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi)		
	20 Pengembangan Kawasan Industri dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup		
	21 Penguatan riset dan pengembangan untuk diversifikasi produk hilirisasi		

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan langkah-langkah terstruktur yang berisi Program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mencapai hasil yang diinginkan melalui alokasi sumber daya. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5(lima) tahun kedepan terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan sesuai dengan uraian tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Propinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

A. Program Rutin:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program teknis

- **Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor

Kegiatan- 2 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi

Kegiatan- 3 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

• **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

• **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada

- Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Secara rinci rencana program dan kegiatan dan pendanaan indikatif disajikan sebagai berikut:.

TABEL 4.1
PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					24.302.331.143,29		25.865.868.113,35		27.608.327.123,54		29.477.395.535,25		31.767.787.663,99	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					20.265.806.064,29		21.719.333.920,35		22.598.710.559,54		23.956.790.471,25		25.678.358.699,99	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,8	72	72,2	20.265.806.064,29	72,4	21.719.333.920,35	72,6	22.598.710.559,54	72,8	23.956.790.471,25	73	25.678.358.699,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	76,61	76,61	85		85		86		86		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,54	90	92		95		95		98		98		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,44	78,69	78,94		79,19		79,44		79,69		79,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					156.517.350		184.346.000		315.058.000		346.563.500		381.220.000	
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	100	156.517.350	100	184.346.000	100	315.058.000	100	346.563.500	100	381.220.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan		
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					96.664.400		101.498.500		191.039.000		210.143.500		231.157.500	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	10	10	96.664.400	10	101.498.500	10	191.039.000	10	210.143.500	10	231.157.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.507.706.250		1.646.116.000		1.810.152.500		1.991.168.000		2.190.284.500	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	5,7	5,5	4,8	1.507.706.250	4	1.646.116.000	3,7	1.810.152.500	3,2	1.991.168.000	2,7	2.190.284.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					525.454.500		551.728.550		732.225.600		805.449.100		885.993.000	
Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	21.337,24	23.470,96	25.818,06	525.454.500	26.592,6	551.728.550	27.390,38	732.225.600	28.212,09	805.449.100	29.622,7	885.993.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1.475.349.529		1.531.768.643		1.801.587.464		1.991.770.964		2.207.712.964	
Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk					1.475.349.529		1.531.768.643		1.801.587.464		1.991.770.964		2.207.712.964	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi (%)	83	86	87		88		89		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					274.833.050		131.076.500		159.554.000		175.510.000		193.061.000	
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	10	274.833.050	10	131.076.500	10	159.554.000	10	175.510.000	10	193.061.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.817.366.950		1.925.781.500		2.216.783.000		2.623.121.000		2.885.430.500	
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.667.163.350		1.718.065.500		1.931.571.500		2.309.388.000		2.540.326.000	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	92,8	93,4	93,27	1.667.163.350	93,5	1.718.065.500	93,73	1.931.571.500	93,97	2.309.388.000	94,21	2.540.326.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
	Cakupan bina pelaku IKM (%)	14,34	15	15,75		16,5		17,25		18		18,75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					105.945.900		111.244.000		139.341.500		153.276.000		168.603.000	
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	100	105.945.900	100	111.244.000	100	139.341.500	100	153.276.000	100	168.603.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					44.257.700		96.472.000		145.870.000		160.457.000		176.501.500	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	88	89	90	44.257.700	91	96.472.000	92	145.870.000	93	160.457.000	94	176.501.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
															Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					26119698093.29		27791649613.35		29825110123.54		32100516535.25		34653218163.99		

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah								
- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) (%)			
		Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (Nilai)			
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi ()	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Persentase Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Difasilitasi (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Tersusunnya dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	
				Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Tersusunnya Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
					Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03.0002 - Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.1.03.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	
				Terfasilitasinya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Terfasilitasinya sarana prasarana perdagangan sesuai standar	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas		
					Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi		
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
			Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	3.30.04.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor		
					Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terkoordinasinya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pesticida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida (Laporan)	3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida	
			Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terfasilitasinya pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	3.30.07.1.01.0002 - Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	3.30.07.1.02.0002 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	
				Terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk				
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa			Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) (USD)		
					Ekspor Barang dan Jasa (PDRB) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi ()	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
					Persentase Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Difasilitasi (%)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Tersusunnya dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	
					Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
				Tersusunnya Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
					Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	
					Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	3.30.02.1.03.0002 - Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	
					Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	3.30.02.1.03.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	
				Terfasilitasinya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya Nilai Ekspor		Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Promosi Dagang Produk Unggulan Sulawesi Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas			Nilai ekspor produksi industry non-migas (Juta USD)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase pertumbuhan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terfasilitasinya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					<p>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</p>	
					<p>-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)</p>	<p>3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri			Jumlah tenaga kerja di sektor industri (Orang)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase pertumbuhan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi (%)		
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Nilai)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
					Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase pertumbuhan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
				Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terfasilitasinya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	

3.31.3.30.0.00.01.0001 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk		Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi	
				Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian	
					Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk	
					Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanjuz Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Nilai Ekspor				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Nilai Ekspor				
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				
		Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
		Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				

3.31.3.30.0.00.01.0002 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)

- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk				
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk				
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Nilai Ekspor				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Nilai Ekspor				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Cakupan bina pelaku IKM (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
		Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Cakupan bina pelaku IKM (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
		Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
			Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Cakupan bina pelaku IKM (%)	3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				

3.31.3.30.0.00.01.0003 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

- MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN DAERAH	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Pemerataan Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Antarwilayah di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	
					Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	3.30.06.1.01.0002 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	
					Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	3.30.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	
				Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
					Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	3.30.06.1.03.0004 - Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
		Meningkatnya Ekspor Barang dan Jasa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Nilai Ekspor				
			Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				
			Meningkatnya Nilai Ekspor				
		Meningkatnya Nilai ekspor produk industri non migas	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya tenaga kerja di sektor industri	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian			
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri			
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian			
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri			
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri			
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri			
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				
		Meningkatnya Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri			
				Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian			
				Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri			
				Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				

**TABEL 4.3.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	41,18	40.97-41.45	41.5-42.48	42.5-43.99	43.5-45.49	47.00-50.99	48.51-51.1	
2	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	7,4	11,1	10,93	10,75	10,58	10,4	10,23	
3	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	%	159,47	90.74-92.16	92.80-94.15	94.91-96.50	96.50-98.79	98.80-101.20	101.20-103.16	
4	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	%	4,79	1,31	1,51	1,72	1,92	2,12	2,32	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	USD	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40	
2	Nilai ekspor produksi industry non-migas	Juta USD	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20,116	
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	135.160	135.417	135.674	135.931	136.188	136.445	136.702	

TABEL 4.3.2

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				24.302.331.143,29		25.865.868.113,35		27.608.327.123,54		29.477.395.535,25		31.767.787.663,99		
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.265.806.064,29		21.719.333.920,35		22.598.710.559,54		23.956.790.471,25		25.678.358.699,99		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	71,8	72,2	20.265.806.064,29	72,4	21.719.333.920,35	72,6	22.598.710.559,54	72,8	23.956.790.471,25	73	25.678.358.699,99	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
3.30.01.1.01 - Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				351.140.300		502.391.450		598.465.000		791.653.000		856.271.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	351.140.300	1	502.391.450	1	598.465.000	1	791.653.000	1	856.271.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				265.527.400		325.800.950		413.894.000		597.853.500		646.967.500		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	265.527.400	1	325.800.950	1	413.894.000	1	597.853.500	1	646.967.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				13.735.350		10.825.000		10.825.000		11.366.000		12.275.500		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	13.735.350	1	10.825.000	1	10.825.000	1	11.366.000	1	12.275.500		
3.30.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.300.000		6.150.000		6.150.000		6.457.500		6.974.500		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.300.000	1	6.150.000	1	6.150.000	1	6.457.500	1	6.974.500		
3.30.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				52.944.700		146.245.500		153.557.500		161.235.500		174.134.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	52.944.700	1	146.245.500	1	153.557.500	1	161.235.500	1	174.134.000		
3.30.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				6.357.350		6.780.500		7.119.500		7.475.500		8.073.500		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	6.357.350	1	6.780.500	1	7.119.500	1	7.475.500	1	8.073.500		
3.30.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6.275.500		6.589.500		6.919.000		7.265.000		7.846.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	6.275.500	1	6.589.500	1	6.919.000	1	7.265.000	1	7.846.000		
3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.663.939.577,29		17.393.253.613,35		18.065.777.523,54		18.785.025.635,25		19.535.894.163,99		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	16.663.939.577,29	1	17.393.253.613,35	1	18.065.777.523,54	1	18.785.025.635,25	1	19.535.894.163,99		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	500	500		500		500		500		500			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	95	157		157		157		157		157			
3.30.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.394.698.927,29		16.010.486.613,35		16.650.906.523,54		17.316.942.635,25		18.009.620.163,99		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	95	157	15.394.698.927,29	157	16.010.486.613,35	157	16.650.906.523,54	157	17.316.942.635,25	157	18.009.620.163,99		
3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				753.600.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000		745.200.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	753.600.000	1	745.200.000	1	745.200.000	1	745.200.000	1	745.200.000		
3.30.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				340.183.850		371.490.000		390.064.500		429.071.000		463.397.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	500	500	340.183.850	500	371.490.000	500	390.064.500	500	429.071.000	500	463.397.000		
3.30.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				85.387.400		139.716.000		146.702.000		154.037.000		166.360.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	85.387.400	12	139.716.000	12	146.702.000	12	154.037.000	12	166.360.000		
3.30.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				46.226.400		46.700.000		49.035.000		51.487.000		55.606.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	46.226.400	1	46.700.000	1	49.035.000	1	51.487.000	1	55.606.000		
3.30.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				15.961.000		41.747.000		43.834.500		46.026.500		49.708.500		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	2	15.961.000	2	41.747.000	2	43.834.500	2	46.026.500	2	49.708.500		
3.30.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				27.882.000		37.914.000		40.035.000		42.261.500		46.002.500		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14	14	27.882.000	14	37.914.000	14	40.035.000	14	42.261.500	14	46.002.500		
3.30.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0		0		0		0		0		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				69.723.350		180.972.000		189.796.000		199.061.000		214.626.500		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	69.723.350		180.972.000	1	189.796.000	1	199.061.000	1	214.626.500		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		4.500.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000	1	4.500.000		
3.30.01.1.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		70.000.000		73.500.000		77.175.000		83.349.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	0	0	1	70.000.000	1	73.500.000	1	77.175.000	1	83.349.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				24.730.000		48.700.000		51.135.000		53.692.000		57.987.500		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	24.730.000	1	48.700.000	1	51.135.000	1	53.692.000	1	57.987.500		
3.30.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				15.657.350		30.100.000		31.605.000		33.185.500		35.840.500		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	15.657.350	2	30.100.000	2	31.605.000	2	33.185.500	2	35.840.500		
3.30.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				24.836.000		27.672.000		29.056.000		30.508.500		32.949.500		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	24.836.000		27.672.000	1	29.056.000	1	30.508.500	1	32.949.500		
3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.781.400		71.031.500		74.283.000		193.725.000		208.742.500		
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	38.781.400	30	71.031.500	30	74.283.000	30	193.725.000	30	208.742.500		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0		0		0		18		18			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0				0				0	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				5.350.000		7.700.000		8.085.000		8.489.500		9.168.500		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	5.350.000	4	7.700.000	4	8.085.000	4	8.489.500	4	9.168.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		116.027.500		125.309.500		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	12	0	0	0	0	0	0	18	116.027.500	18	125.309.500		
3.30.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				27.431.400		57.331.500		60.198.000		63.208.000		68.264.500		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	30	27.431.400	30	57.331.500	30	60.198.000	30	63.208.000	30	68.264.500		
3.30.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000	30	1.000.000		
3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				210.929.300		404.210.000		423.920.500		444.617.000		479.386.000		
Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	115.373.300	1	211.535.000	1	221.861.500	1	232.705.000	1	250.921.500		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	4	0		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.029.800		10.061.000		10.564.000		11.092.500		11.979.500		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	5.029.800	4	10.061.000	4	10.564.000	4	11.092.500	4	11.979.500		
3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				71.743.500		123.492.500		129.667.000		136.150.500		147.042.500		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	71.743.500	4	123.492.500	4	129.667.000	4	136.150.500	4	147.042.500		
3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0		39.381.500		41.350.500		43.418.000		46.891.500		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	0	0	4	39.381.500	4	41.350.500	4	43.418.000	4	46.891.500		
3.30.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				33.600.000		33.600.000		35.280.000		37.044.000		40.008.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	33.600.000	12	33.600.000	12	35.280.000	12	37.044.000	12	40.008.000		
3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
Meningkatnya pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	90.556.000	4	187.675.000	4	197.059.000	4	206.912.000	4	223.464.500		
3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.556.000		187.675.000		197.059.000		206.912.000		223.464.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	90.556.000	4	187.675.000	4	197.059.000	4	206.912.000	4	223.464.500		
Meningkatnya pengawasan kearsipan internal	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4.415.580		0		0		190.313.800		853.482.000		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	4.415.580	0	0	0	0	0	190.313.800	0	853.482.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0		0	0	0	0	0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	1		0		0		10		40		0		
3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0			
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0			
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.415.580		0		0		190.313.800		853.482.000			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	1	4.415.580	0	0	0	0	10	190.313.800	40	853.482.000			
3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				539.516.820		542.017.500		569.118.000		597.574.000		645.380.000			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	539.516.820	4	542.017.500	4	569.118.000	4	597.574.000	4	645.380.000			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300.000		300.000		315.000		331.000		357.500		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	1	300.000	1	300.000	1	315.000	1	331.000	1	357.500		
3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				390.055.200		390.055.500		409.558.000		430.036.000		464.439.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	390.055.200	4	390.055.500	4	409.558.000	4	430.036.000	4	464.439.000		
3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				149.161.620		151.662.000		159.245.000		167.207.000		180.583.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	149.161.620	4	151.662.000	4	159.245.000	4	167.207.000	4	180.583.500		
3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				541.229.600		628.012.500		659.413.500		692.384.500		747.775.000		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	154	109	541.229.600	109	628.012.500	109	659.413.500	109	692.384.500	109	747.775.000		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	46	48		48		48		48		48			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				370.799.600		428.182.500		449.592.000		472.071.500		509.837.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	46	48	370.799.600	48	428.182.500	48	449.592.000	48	472.071.500	48	509.837.000		
3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				120.430.000		139.830.000		146.821.500		154.163.000		166.496.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	154	109	120.430.000	109	139.830.000	109	146.821.500	109	154.163.000	109	166.496.000		
3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000		60.000.000		63.000.000		66.150.000		71.442.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	63.000.000	1	66.150.000	1	71.442.000		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	76,61	85	20.265.806.064,29	85	21.719.333.920,35	86	22.598.710.559,54	86	23.956.790.471,25	86	25.678.358.699,99	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				186.870.000		186.870.000		186.870.000		186.870.000		186.870.000		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000		
3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				186.870.000		186.870.000		186.870.000		186.870.000		186.870.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000	1	186.870.000		
3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.062.163		172.927.000		181.573.500		190.652.500		205.904.500		
Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	57.062.163	1	172.927.000	1	181.573.500	1	190.652.500	1	205.904.500		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.287.173		3.237.500		3.399.500		3.569.500		3.855.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.287.173	1	3.237.500	1	3.399.500	1	3.569.500	1	3.855.000		
3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				19.842.640		49.012.000		51.462.500		54.035.500		58.358.500		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	19.842.640	1	49.012.000	1	51.462.500	1	54.035.500	1	58.358.500		
3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				16.086.350		31.310.500		32.876.000		34.520.000		37.281.500		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	16.086.350	1	31.310.500	1	32.876.000	1	34.520.000	1	37.281.500		
3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18.846.000		89.367.000		93.835.500		98.527.500		106.409.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	18.846.000	1	89.367.000	1	93.835.500	1	98.527.500	1	106.409.500		
3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317.479.188		320.308.036		323.576.536		327.009.036		332.774.536		
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	317.479.188	4	320.308.036	4	323.576.536	4	327.009.036	4	332.774.536		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.688.000		15.498.000		16.273.000		17.087.000		18.453.500		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	12.688.000	1	15.498.000	1	16.273.000	1	17.087.000	1	18.453.500		
3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				254.935.536		254.935.536		254.935.536		254.935.536		254.935.536		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	254.935.536	4	254.935.536	4	254.935.536	4	254.935.536	4	254.935.536		
3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				49.855.652		49.874.500		52.368.000		54.986.500		59.385.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	49.855.652	4	49.874.500	4	52.368.000	4	54.986.500	4	59.385.500		
3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.850.000		130.546.321		111.380.000		113.994.500		118.387.000		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	0	85.850.000	0	130.546.321	0	111.380.000	0	113.994.500	0	118.387.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	6		6		6		6		6			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	65		65		70		75		80			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				44.090.000		59.090.000		59.090.000		59.090.000		59.090.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	6	44.090.000	6	59.090.000	6	59.090.000	6	59.090.000	6	59.090.000		
3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				41.760.000		71.456.321		52.290.000		54.904.500		59.297.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	64	65	41.760.000	65	71.456.321	70	52.290.000	75	54.904.500	80	59.297.000		
3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	89,54	92	20.265.806.064,29	95	21.719.333.920,35	95	22.598.710.559,54	98	23.956.790.471,25	98	25.678.358.699,99	3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				504.900.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	504.900.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				504.900.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	504.900.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.181.228		64.487.000		67.712.000		71.098.000		76.785.500		
Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	33.181.228	1	64.487.000	1	67.712.000	1	71.098.000	1	76.785.500		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0		1		1		1		1			
3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				738.378		1.583.000		1.662.500		1.745.500		1.885.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	738.378	2	1.583.000	2	1.662.500	2	1.745.500	2	1.885.000		
3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.125.550		33.849.000		35.541.500		37.318.500		40.304.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	21.125.550	2	33.849.000	2	35.541.500	2	37.318.500	2	40.304.000		
3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.477.300		5.900.000		6.195.000		6.505.000		7.025.500		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.477.300	1	5.900.000	1	6.195.000	1	6.505.000	1	7.025.500		
3.30.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				8.840.000		12.805.000		13.445.500		14.118.000		15.247.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	8.840.000	1	12.805.000	1	13.445.500	1	14.118.000	1	15.247.000		
3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0		10.350.000		10.867.500		11.411.000		12.324.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	0	0	1	10.350.000	1	10.867.500	1	11.411.000	1	12.324.000		
3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				184.411.858		184.412.000		193.632.500		203.314.500		219.579.500		
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	184.411.858	0	184.412.000	0	193.632.500	0	203.314.500	0	219.579.500		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				149.411.858		149.412.000		156.882.500		164.727.000		177.905.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	149.411.858	4	149.412.000	4	156.882.500	4	164.727.000	4	177.905.000		
3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				35.000.000		35.000.000		36.750.000		38.587.500		41.674.500		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	35.000.000	4	35.000.000	4	36.750.000	4	38.587.500	4	41.674.500		
3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.460.500		143.048.000		150.200.500		157.710.500		170.327.500		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	40	120.460.500	42	143.048.000	44	150.200.500	46	157.710.500	48	170.327.500		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0							
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	8		8		8							
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0							
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0							
3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					75.040.500				81.048.000				85.100.500	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	8	75.040.500	8	81.048.000	8	85.100.500	8	89.355.500	8	96.504.000		
3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.420.000		62.000.000		65.100.000		68.355.000		73.823.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	42	40	45.420.000	42	62.000.000	44	65.100.000	46	68.355.000	48	73.823.500		
3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	78,44	78,94	20.265.806.064,29	79,19	21.719.333.920,35	79,44	22.598.710.559,54	79,69	23.956.790.471,25	79,94	25.678.358.699,99	3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.30.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				231.960.000		231.960.000		231.960.000		231.960.000		231.960.000		
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000		
3.30.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				231.960.000		231.960.000		231.960.000		231.960.000		231.960.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000	1	231.960.000		
3.30.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				26.746.500		57.365.000		60.233.500		63.488.500		68.567.500		
Meningkatnya kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	26.746.500	1	57.365.000	1	60.233.500	1	63.488.500	1	68.567.500		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.693.500		19.194.500		20.154.500		21.363.500		23.072.500		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.693.500	1	19.194.500	1	20.154.500	1	21.363.500	1	23.072.500		
3.30.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				3.743.000		4.010.500		4.211.000		4.463.500		4.820.500		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	3.743.000	1	4.010.500	1	4.211.000	1	4.463.500	1	4.820.500		
3.30.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.310.000		34.160.000		35.868.000		37.661.500		40.674.500		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	15.310.000	1	34.160.000	1	35.868.000	1	37.661.500	1	40.674.500		
3.30.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				0		0		0		0		0		
Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.606.800		50.970.000		53.518.500		56.194.500		60.690.000		
Meningkatnya kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	48.606.800	0	50.970.000	0	53.518.500	0	56.194.500	0	60.690.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
3.30.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				47.256.800		49.620.000		52.101.000		54.706.000		59.082.500		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	47.256.800	4	49.620.000	4	52.101.000	4	54.706.000	4	59.082.500		
3.30.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.350.000		1.350.000		1.417.500		1.488.500		1.607.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.350.000	1	1.350.000	1	1.417.500	1	1.488.500	1	1.607.500		
3.30.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.601.900		54.552.000		57.280.000		60.144.500		64.955.500		
Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	48.601.900	1	54.552.000	1	57.280.000	1	60.144.500	1	64.955.500		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		0			
3.30.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				26.856.900		30.857.000		32.400.000		34.020.000		36.741.500		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	4	26.856.900	4	30.857.000	4	32.400.000	4	34.020.000	4	36.741.500		
3.30.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.740.000		8.690.000		9.124.500		9.581.000		10.347.500		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	5	6.740.000	5	8.690.000	5	9.124.500	5	9.581.000	5	10.347.500		
3.30.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.005.000		15.005.000		15.755.500		16.543.500		17.866.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.005.000	1	15.005.000	1	15.755.500	1	16.543.500	1	17.866.500		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				156.517.350		184.346.000		315.058.000		346.563.500		381.220.000		
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	100	100	156.517.350	100	184.346.000	100	315.058.000	100	346.563.500	100	381.220.000	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri yang Difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
3.30.02.1.01 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor				0		0		0		0		0		
Tersusunnya dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
3.30.02.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0		0		0		0		0		
Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.02.1.01.0002 - Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				41.137.350		43.194.500		78.767.000		86.643.500		95.308.000			
Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi SIUP MB dan B2 bagi distributor	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	41.137.350	1	43.194.500	1	78.767.000	1	86.643.500	1	95.308.000			
3.30.02.1.02.0001 - Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				41.137.350		43.194.500		78.767.000		86.643.500		95.308.000			
Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1	1	41.137.350	1	43.194.500	1	78.767.000	1	86.643.500	1	95.308.000			
3.30.02.1.03 - Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar				0		0		0		0		0			
Tersusunnya Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.02.1.03.0002 - Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.02.1.03.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya				0		0		0		0		0			
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				115.380.000		141.151.500		236.291.000		259.920.000		285.912.000		
Terfasilitasinya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	1	115.380.000	1	141.151.500	1	236.291.000	1	259.920.000	1	285.912.000		
3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				115.380.000		141.151.500		236.291.000		259.920.000		285.912.000		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	1	1	115.380.000	1	141.151.500	1	236.291.000	1	259.920.000	1	285.912.000		
Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				96.664.400		101.498.500		191.039.000		210.143.500		231.157.500		
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efesien, Merata Dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	0	10	96.664.400	10	101.498.500	10	191.039.000	10	210.143.500	10	231.157.500	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				96.664.400		101.498.500		191.039.000		210.143.500		231.157.500		
Terfasilitasinya sarana prasarana perdagangan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	1	1	96.664.400	1	101.498.500	1	191.039.000	1	210.143.500	1	231.157.500		
	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	2	2		2		3		4		5			
	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	1		0		0		0		0			
3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				41.103.000		65.719.500		146.260.000		156.364.500		168.378.500		
Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	1	1	41.103.000	1	65.719.500	1	146.260.000	1	156.364.500	1	168.378.500		
3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas				35.779.100		35.779.000		44.779.000		53.779.000		62.779.000		
Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)	2	2	35.779.100	2	35.779.000	3	44.779.000	4	53.779.000	5	62.779.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.03.1.01.0004 - Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi				19.782.300		0		0		0		0		
Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (Kegiatan)	0	1	19.782.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi				96.664.400		101.498.500		191.039.000		210.143.500		231.157.500	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				1.507.706.250		1.646.116.000		1.810.152.500		1.991.168.000		2.190.284.500		
Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	5,7	4,8	1.507.706.250	4	1.646.116.000	3,7	1.810.152.500	3,2	1.991.168.000	2,7	2.190.284.500	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi				35.756.850		109.198.500		116.300.000		122.000.000		135.000.000		
Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	4	4	35.756.850	4	109.198.500	4	116.300.000	4	122.000.000	4	135.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	4	0		4		4		4		4			
3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				35.756.850		60.800.000		65.800.000		70.000.000		80.000.000		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)	4	4	35.756.850	4	60.800.000	4	65.800.000	4	70.000.000	4	80.000.000		
3.30.04.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor				0		48.398.500		50.500.000		52.000.000		55.000.000		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (laporan)	4	0	0	4	48.398.500	4	50.500.000	4	52.000.000	4	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1.436.917.100		1.536.917.500		1.693.852.500		1.869.168.000		2.055.284.500		
Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kab/Kota yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	1.436.917.100	4	1.536.917.500	4	1.693.852.500	4	1.869.168.000	4	2.055.284.500		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				150.845.700		170.846.000		213.852.500		240.000.000		250.000.000		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Laporan)	4	4	150.845.700	4	170.846.000	4	213.852.500	4	240.000.000	4	250.000.000		
3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1.286.071.400		1.366.071.500		1.480.000.000		1.629.168.000		1.805.284.500		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)	4	4	1.286.071.400	4	1.366.071.500	4	1.480.000.000	4	1.629.168.000	4	1.805.284.500		
3.30.04.1.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				35.032.300		0		0		0		0		
Terkoordinasinya pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)	1	1	35.032.300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
3.30.04.1.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi				0		0		0		0		0		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.04.1.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida				35.032.300		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pesticida (Laporan)	1	1	35.032.300	0	0	0	0	0	0	0	0					
Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				1.507.706.250		1.646.116.000		1.810.152.500		1.991.168.000		2.190.284.500	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)				
																3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
																	3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				525.454.500		551.728.550		732.225.600		805.449.100		885.993.000					
Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	21.337,24	25.818,06	525.454.500	26.592,6	551.728.550	27.390,38	732.225.600	28.212,09	805.449.100	29.622,7	885.993.000	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah				
3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				525.454.500		551.728.550		732.225.600		805.449.100		885.993.000					
Terlaksananya Promosi Dagang Produk Unggulan Sulawesi Tengah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	16	6	525.454.500	6	551.728.550	6	732.225.600	6	805.449.100	7	885.993.000					
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	5	2		2		2		3								
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	0		0		0		0								
	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	24	30		30		30		30								
3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional				179.826.000		195.658.050		217.456.000		239.201.600		263.121.700					
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	16	6	179.826.000	6	195.658.050	6	217.456.000	6	239.201.600	7	263.121.700					
3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal				252.168.450		257.936.500		337.584.600		371.343.500		408.477.400					
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	24	30	252.168.450	30	257.936.500	30	337.584.600	30	371.343.500	30	408.477.400					
3.30.05.1.01.0003 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				0		0		0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				93.460.050		98.134.000		177.185.000		194.904.000		214.393.900		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)	5	2	93.460.050	2	98.134.000	2	177.185.000	2	194.904.000	3	214.393.900		
Meningkatnya Nilai Ekspor				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1.475.349.529		1.531.768.643		1.801.587.464		1.991.770.964		2.207.712.964		
Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase Layanan Pengujian dan Kalibrasi yang Terakreditasi dan Non Akreditasi (%)	83	87		88		89		90		91		3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				445.061.679		449.983.643		535.964.464		599.584.964		676.308.964		
Terlaksananya Kalibrasi alat ukur industri dan usaha berdasarkan standar internasional (SI)	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	366	370	147.530.200	370	152.452.164	375	178.521.664	375	204.898.184	380	241.153.008		
3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi				147.530.200		152.452.164		178.521.664		204.898.184		241.153.008		
Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)	366	370	147.530.200	370	152.452.164	375	178.521.664	375	204.898.184	380	241.153.008		
Terlaksananya Pengujian mutu komoditi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	478	478	297.531.479	478	297.531.479	480	357.442.800	480	394.686.780	480	435.155.956		
	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	1	3		3		3		3		3			
3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian				218.897.967		186.791.967		218.896.967		240.786.663		265.365.329		
Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)	478	478	218.897.967	478	186.791.967	480	218.896.967	480	240.786.663	480	265.365.329		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk				58.940.812		58.940.812		58.940.812		66.334.593		73.468.052		
Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)	1	3	58.940.812	3	58.940.812	3	58.940.812	3	66.334.593	3	73.468.052		
3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi				19.692.700		51.798.700		79.605.021		87.565.524		96.322.575		
Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)	1	1	19.692.700	1	51.798.700	1	79.605.021	1	87.565.524	1	96.322.575		
Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100		100		100		100		100		3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				915.669.650		961.454.000		1.043.834.500		1.148.218.500		1.263.040.000		
Terlaksananya fasilitasi pengaduan Konsumen yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	4	5	915.669.650	5	961.454.000	5	1.043.834.500	5	1.148.218.500	5	1.263.040.000		
	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	32	45		45		45		45		45			
	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	1	1		1		1		1		1			
3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen				868.099.800		906.147.000		962.964.000		1.059.260.500		1.165.186.500		
Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)	4	5	868.099.800	5	906.147.000	5	962.964.000	5	1.059.260.500	5	1.165.186.500		
3.30.06.1.01.0002 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen				17.319.850		25.057.000		44.004.500		48.405.000		53.245.500		
Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM)	1	1	17.319.850	1	25.057.000	1	44.004.500	1	48.405.000	1	53.245.500		
3.30.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen				30.250.000		30.250.000		36.866.000		40.553.000		44.608.000		
Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani (Pengaduan)	32	45	30.250.000	45	30.250.000	45	36.866.000	45	40.553.000	45	44.608.000		
3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				114.618.200		120.331.000		221.788.500		243.967.500		268.364.000		
Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	8	9	114.618.200	9	120.331.000	9	221.788.500	9	243.967.500	10	268.364.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	2	2		2		2		2		2				
3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				75.403.300		79.155.000		142.873.500		157.161.000		172.877.000			
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)	2	2	75.403.300	2	79.155.000	2	142.873.500	2	157.161.000	2	172.877.000			
3.30.06.1.03.0004 - Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga				39.214.900		41.176.000		78.915.000		86.806.500		95.487.000			
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)	8	9	39.214.900	9	41.176.000	9	78.915.000	9	86.806.500	10	95.487.000			
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				274.833.050		131.076.500		159.554.000		175.510.000		193.061.000			
Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	10	274.833.050	10	131.076.500	10	159.554.000	10	175.510.000	10	193.061.000	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah		
3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri				52.267.500		58.510.500		73.510.500		82.510.000		85.510.000			
Terfasilitasinya pelaku usaha pada kegiatan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	0	2	52.267.500	2	58.510.500	3	73.510.500	4	82.510.000	4	85.510.000			
3.30.07.1.01.0002 - Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				52.267.500		58.510.500		73.510.500		82.510.000		85.510.000			
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri (UMKM)	0	2	52.267.500	2	58.510.500	3	73.510.500	4	82.510.000	4	85.510.000			
3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri				203.130.850		53.131.000		56.043.500		58.000.000		67.551.000			
Terfasilitasinya pelaku usaha yang diikutsertakan pada bimtek dan pameran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	60	25	203.130.850	25	53.131.000	30	56.043.500	30	58.000.000	35	67.551.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.07.1.02.0002 - Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi				203.130.850		53.131.000		56.043.500		58.000.000		67.551.000		
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	60	25	203.130.850	25	53.131.000	30	56.043.500	30	58.000.000	35	67.551.000		
3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				19.434.700		19.435.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	1	1	19.434.700	1	19.435.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				19.434.700		19.435.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	1	1	19.434.700	1	19.435.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000		
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.817.366.950		1.925.781.500		2.216.783.000		2.623.121.000		2.885.430.500		
3.31.02 - PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.667.163.350		1.718.065.500		1.931.571.500		2.309.388.000		2.540.326.000		
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	92,8	93,27	1.667.163.350	93,5	1.718.065.500	93,73	1.931.571.500	93,97	2.309.388.000	94,21	2.540.326.000	3.31.3.30.0.00.01.00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
	Persentase Angkatan Kerja yang terfasilitasi (%)	0	100		100		100		100		100			
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1.031.004.200		1.050.097.500		1.169.168.500		1.286.086.000		1.414.694.000		
Persentase pertumbuhan industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	501.574.500	1	546.655.000	1	608.168.500	1	668.986.000	1	735.884.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				46.750.200		61.777.000		82.281.500		102.554.000		124.853.400		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	1	1	46.750.200	1	61.777.000	1	82.281.500	1	102.554.000	1	124.853.400		
3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				77.839.700		92.866.500		113.371.000		133.643.500		155.942.800		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1	1	77.839.700	1	92.866.500	1	113.371.000	1	133.643.500	1	155.942.800		
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				376.984.600		392.011.500		412.516.000		432.788.500		455.087.800		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1	2	376.984.600	2	392.011.500	2	412.516.000	2	432.788.500	2	455.087.800		
Terfasilitasinya angkatan kerja melalui kegiatan vokasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	2	529.429.700	2	503.442.500	2	561.000.000	2	617.100.000	2	678.810.000		
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1		1		1		1					
3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi				50.000.000		154.221.250		187.000.000		205.700.000		226.270.000		
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	1	50.000.000	1	154.221.250	1	187.000.000	1	205.700.000	1	226.270.000		
3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				399.960.850		195.000.000		187.000.000		205.700.000		226.270.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2	2	399.960.850	2	195.000.000	2	187.000.000	2	205.700.000	2	226.270.000		
3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				79.468.850		154.221.250		187.000.000		205.700.000		226.270.000		
Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1	1	79.468.850	1	154.221.250	1	187.000.000	1	205.700.000	1	226.270.000		
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
	Cakupan bina pelaku IKM (%)	14,34	15,75		16,5		17,25		18		18,75		3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				636.159.150		667.968.000		762.403.000		1.023.302.000		1.125.632.000		
Terlaksananya fasilitasi layanan IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	2	636.159.150	2	667.968.000	2	762.403.000	2	1.023.302.000	2	1.125.632.000		
3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				636.159.150		667.968.000		762.403.000		1.023.302.000		1.125.632.000		
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2	2	636.159.150	2	667.968.000	2	762.403.000	2	1.023.302.000	2	1.125.632.000		
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				105.945.900		111.244.000		139.341.500		153.276.000		168.603.000		
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0	100	105.945.900	100	111.244.000	100	139.341.500	100	153.276.000	100	168.603.000	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				105.945.900		111.244.000		139.341.500		153.276.000		168.603.000		
Terfasilitasinya Pengawasan dan Pengendalian Izin Usaha Industri	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	105.945.900	1	111.244.000	1	139.341.500	1	153.276.000	1	168.603.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi				39.591.000		55.622.000		69.670.500		76.638.000		84.300.000		
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	1	39.591.000	1	55.622.000	1	69.670.500	1	76.638.000	1	84.300.000		
3.31.03.1.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				66.354.900		55.622.000		69.671.000		76.638.000		84.303.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. (Dokumen)	1	1	66.354.900	1	55.622.000	1	69.671.000	1	76.638.000	1	84.303.000		
Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				44.257.700		96.472.000		145.870.000		160.457.000		176.501.500		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	88	90	44.257.700	91	96.472.000	92	145.870.000	93	160.457.000	94	176.501.500	3.31.3.30.0.00.01.00 00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				44.257.700		96.472.000		145.870.000		160.457.000		176.501.500		
Terawasinya industri kewenangan provinsi yang melapor pada SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	1	1	44.257.700	1	96.472.000	1	145.870.000	1	160.457.000	1	176.501.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
3.31.04.1.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				13.732.950		31.137.500		47.603.500		52.465.900		57.814.000		
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1	1	13.732.950	1	31.137.500	1	47.603.500	1	52.465.900	1	57.814.000		
3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				14.467.100		31.872.000		48.338.000		53.200.300		58.548.500		
Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)	1	1	14.467.100	1	31.872.000	1	48.338.000	1	53.200.300	1	58.548.500		
3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				16.057.650		33.462.500		49.928.500		54.790.800		60.139.000		
Terantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	1	1	16.057.650	1	33.462.500	1	49.928.500	1	54.790.800	1	60.139.000		
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri				0		0		0		0		0	3.31.3.30.0.00.01.00 01 - UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 02 - UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)	
													3.31.3.30.0.00.01.00 03 - UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	

TABEL 4.4
DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah				
1.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Kemudahan Proses Perizinan Dan Pendaftaran Berusaha	3.30.02.1.02 - Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi 3.30.02.1.02.0001 - Fasilitas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 3.30.02.1.04 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 3.30.02.1.04.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
2.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANADISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan Dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata Dan Terintegrasi	3.30.03.1.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas 3.30.03.1.01.0002 - Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 3.30.03.1.01.0003 - Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	
3.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Kelancaran Distribusi Dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.30.04.1.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi 3.30.04.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 3.30.04.1.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 3.30.04.1.02 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 3.30.04.1.02.0002 - Operasi Pasar dalam rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
4.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGA NEKSPOR	Meningkatnya Nilai Ekspor	3.30.05.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi 3.30.05.1.01.0001 - Pameran Dagang Internasional/Nasional 3.30.05.1.01.0002 - Pameran Dagang Lokal 3.30.05.1.01.0004 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
5.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Tertib Niaga Dan Mutu Produk	3.30.06.1.01 - Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 3.30.06.1.01.0001 - Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen 3.30.06.1.01.0002 - Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 3.30.06.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 3.30.06.1.02 - Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 3.30.06.1.02.0004 - Pengembangan Layanan Kalibrasi 3.30.06.1.02.0005 - Pengembangan Layanan Pengujian 3.30.06.1.02.0006 - Pemantauan Mutu Produk 3.30.06.1.02.0007 - Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi 3.30.06.1.03 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 3.30.06.1.03.0003 - Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 3.30.06.1.03.0004 - Fasilitas Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
6.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.30.07.1.01 - Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 3.30.07.1.01.0002 - Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 3.30.07.1.02 - Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.1.02.0002 - Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 3.30.07.1.03 - Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.1.03.0002 - Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
7.	3.31.02 -	Meningkatnya Realisasi	3.31.02.1.01 - Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	

	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pembangunan Industri	3.31.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	
			3.31.02.1.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			3.31.02.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.1.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			3.31.02.1.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			3.31.02.1.01.0006 - Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
8.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	3.31.03.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	
			3.31.03.1.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	
			3.31.03.1.01.0004 - Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
9.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3.31.04.1.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.04.1.01.0001 - Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
			3.31.04.1.01.0002 - Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
			3.31.04.1.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	

Adapun penyalarsan Program BERANI sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan antara lain:

1. BERANI HARMONI

BERANI HARMONI, dengan Program Unggulan Peningkatan jumlah Wirausaha Baru (WUB) sebanyak 20.000 WUB selama 5 tahun, yang mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan diserahi tanggung jawab untuk dapat meningkatkan WUB sebanyak 1.500 WUB selama 5 tahun. Dinas Perindustrian akan melaksanakan program ini melalui kegiatan- kegiatan seperti pelatihan berbasis vokasi, pendampingan dan fasilitasi perizinan/legalitas serta peningkatan peningkatan daya saing industri. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab untuk meningkatkan WUB, dengan meningkatnya WUB diharapkan dapat terjadi pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah.

2. BERANI SEJAHTERA

BERANI SEJAHTERA, dengan Program Unggulan Satu Harga Bahan Pangan Strategis serta Menjaminan Kestabilan Harga. Dinas Perindustrian akan melaksanakan program ini melalui kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar, serta pemantauan harga harian dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (BAPOKTING) pada pasar pantauan di 13 Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan BAPOKTING di Kabupaten/Kota. Indikator Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi menunjukkan Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi. Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin homogen dan konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di tingkat provinsi.

3. BERANI MAKMUR

Pada BERANI MAKMUR Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung secara tidak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing hasil produksi di sektor hulu

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.31.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah									
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	41,18	40.97-41.45	41.5-42.48	42.5-43.99	43.5-45.49	47.00-50.99	48.51-51.1	
3.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	135.160	135.417	135.674	135.931	136.188	136.445	136.702	
4.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Nilai	7,4	11,1	10,93	10,75	10,58	10,4	10,23	
5.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	USD	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40	
6.	Nilai ekspor produksi industry non-migas	Juta USD	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20,116	
7.	Ekspor Barang dan Jasa (PDRB)	%	159,47	90.74-92.16	92.80-94.15	94.91-96.50	96.50-98.79	98.80-101.20	101.20-103.16	
8.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada level provinsi	%	4,79	1,31	1,51	1,72	1,92	2,12	2,32	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
2.	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	positif	USD	10.540,90	11.041,52	11.543,86	12.046,11	12.548,26	12.850,33	13.152,40	
3.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
4.	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	positif	Orang	135.160	135.417	135.674	135.931	136.188	136.445	136.702	
5.	Nilai ekspor produksi industry non-migas	positif	Juta USD	17.828,09	18.398,59	18.969,09	19.539,59	20.110,09	20.113,29	20,116	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan upaya untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan untuk jangka waktu lima (5) tahun, dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 yang ditunjukkan pada visi **“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”**, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan, serta meningkatkan peran sektor perindustrian dan perdagangan dalam memajukan perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator- indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU), indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program (outcome). Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk jangka waktu tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan 5 tahun kedepan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029; dan

2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendukung suksesnya Program RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029.

Keberhasilan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025–2029, secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2025–2029 ini, untuk menjadi pedoman dalam perencanaan tahunan serta akan menjadi acuan untuk mengukur/menilai kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 10 Oktober 2025
Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE. MSA
Pembina Utama Madya
NIP. 19821123 200604 1 006